



info indonesia

● TABLOID

REFERENSI PEMILU 2024 ●

MINGGU IV JANUARI 2024

HARGA, @ Rp 20.000,-



Road to
Election
2024



9 NAGA PERKUAT SATU PUTARAN

MARUARAR SIRAIT DUKUNG PRABOWO



► CEGAH
POLITIK UANG
AWASI
RAPAT UMUM

► KAYA SUMBER
DAYA ALAM
INDONESIA SULIT
BERDAULAT

► SURYA
PALOH IKUT
TURUN
GUNUNG

► GIBRAN
LANJUTKAN
HILIRISASI
JOKOWI

► IJECK ATAU
BOBBY
NASUTION
UNTUK SUMUT

“Karena sudah diatur zonasi dan jadwal kampanye, seharusnya kampanye masing-masing pasangan calon tidak tumpang tindih. Ini butuh komitmen dari peserta pemilu dan antisipasi dari penyelenggara pemilu”

Ihsan Maulana



Wakil Anak Muda

Situasi politik di Pemilu 2024 ini jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Selain persaingannya yang tidak terlalu tajam, semua kontestan juga merasa lebih muda. Semua mengklaim mewakili kaum milenial dan Generasi Z.

Soal umur bukan patokan. Tua bukan berarti tidak bisa bergaya anak muda. Bahkan perhatiannya lebih besar. Sementara yang muda bukan menjadi jaminan bisa mewakili kaum milenial bila tidak bisa memahami karakternya.

Jumlah pemilih kaum muda yang mencapai lebih dari 50 persen menjadi lumbung suara yang harus diraih para kontestan dalam upaya menuju Indonesia Emas. Pemilu 2024 dianggap menjadi momentum yang tepat untuk mencapai hal tersebut yang diprediksi terjadi di 2045.

Sehingga, menjadi suatu hal yang wajar kalau para kontestan merasa mewakili kaum muda. Program-program yang ditawarkan juga tidak lepas dari keresahan khas anak muda, yakni lapangan pekerjaan, digitalisasi, dan berbagai percepatan-percepatan lainnya.

Di Pilpres 2024, isu yang berkaitan anak muda terasa kental sekali. Gimmick politik yang dimainkan Gibran Rakabuming Raka seakan mampu memancing perasaan Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD.

Secara pengalaman, Gibran mungkin belum ada apa-apanya dibanding Muhaimin dan Mahfud. Namun, kekurangan itu ditutupinya dengan game-game politik dan aksi cepat tanggapnya sebagai karakter anak muda, yakni bergerak cepat, sigap dan reaktif dengan situasi di sekelilingnya.

Untuk pengalaman, Gibran bisa menggantungkannya dengan sosok Prabowo Subianto yang memang kenyang dalam berbagai pengalaman.

Di sisi lain, sosok Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tentu secara fisik lebih muda dibanding Prabowo Subianto. Namun, Prabowo juga memberi jawaban dengan goyang Gemoy dan sikap-sikap atraktif lainnya.

Prabowo seakan memberi pesan kalau usia hanya sebuah angka. Namun soal jiwa, dia sama mudanya dengan Gibran.

Peran kader di daerah tentu menjadi penting untuk menyampaikan pesan-pesan tanpa sinyal ini. Mereka harus mampu menerjemahkan sikap dan tindakan dari capres dan cawapres yang didukung.

Hal ini juga menjadi kunci sukses menang tidaknya mereka di Pilpres 2024. Gagal menerjemahkan berarti tujuan mereka juga ikut tidak berhasil.

Para kader harus mampu meyakinkan anak muda kalau capres dan cawapres mereka bisa menjadi wakil yang sesungguhnya.

Situasi politik di Pemilu 2024 ini juga menunjukkan adanya pergeseran generasi. Senioritas yang dihadirkan politisi-politisi saat ini, seperti terasa hampa, bahkan terasa membosankan.

Sehingga bisa saja ini menjadi masa terakhir mereka untuk menentukan arah politik Indonesia ke depan. Selanjutnya biarlah generasi generasi berikutnya yang melanjutkan. Selamat membaca!!!





“Kita juga menyaksikan upaya yang dilakukan paslon tertentu untuk menyeret kepala desa masuk ke dalam pusaran politik dengan berbagai modus”

Muhammad Syaugi

KHAWATIR MENTERI TIDAK NETRAL

Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan, menyinggung soal menteri-menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tidak netral di Pilpres 2024.

“Presiden bilang harus netral bukan? Ada yang berani menentang perintah itu? Kalau ada yang berani, apakah presiden diam saja?” kata Anies saat kampanye akbar di GOR Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 22 Januari 2024.

Anies mengimbau kepada siapapun, termasuk para menteri di kabinet Jokowi, untuk tidak melawan perintah Presiden. Menteri sebagai pembantu Presiden, seharusnya mematuhi apapun perintah Presiden termasuk terkait netralitasnya.

“Kalau Presiden sudah mengatakan harus netral, janganlah melawan Presiden,” katanya.

Mantan Rektor Universitas Paramadina Jakarta itu meminta kepada Presiden Jokowi untuk tidak segan-segan memberi sanksi tegas terhadap menteri-menteri yang bersikap tidak netral pada Pilpres 2024. Bahkan, masyarakat diminta untuk melaporkan jika menemukan menteri yang mendukung salah satu pasangan calon.

“Kalau ada yang tidak menaati Presiden, maka diberi sanksi pada yang tidak taat,” ujarnya.

Anies mengungkapkan, masyarakat masih menunggu ketegasan dari pemerintah dalam memberi sanksi kepada pejabat negara yang tidak bersikap netral pada Pemilu 2024. Apalagi, yang terang-terangan mendukung salah satu paslon.

Kata Anies, jika terdapat menteri yang mendukung salah satu pun, alangkah baiknya untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Sehingga, nantinya akan lebih leluasa untuk memberikan dukungannya. Dan, yang terpenting adalah untuk memastikan kekuasaan tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu.

Anies juga meminta kepada pemerintah dan Presiden Jokowi untuk memberikan penjelasan lebih rinci terkait batasan-batasan yang diperbolehkan atau tidak yang dilakukan para menteri selama Pemilu 2024 ini masih berlangsung.

“Rakyat ini menunggu. ‘Hey, kita sudah tahu nih, ini forbidden, tidak boleh masuk kalau ada tanda forbidden’. Terus kalau ada yang masuk

(melanggar) diapain? Kita sanksi. Sanksinya apa? Tilang. Betul, kan?” jelasnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun mengaku khawatir penyelenggaraan Pemilu 2024 akan menjadi hancur ketika banyak diwarnai pelanggaran tanpa ada penindakan. Anies menambahkan, adanya pelanggaran tanpa penindakan akan mendegradasi indeks demokrasi di Indonesia. Sebab, penindakan pelanggaran Pemilu merupakan indikator terpenting dalam meningkatkan indeks demokrasi di Indonesia.

“Kalau tidak diberi sanksi, artinya apa boleh? Habis itu kacau jalannya. Kenapa kacau? Ya, semua orang melanggar, forbidden,” tuturnya.

Menurut calon presiden yang diusung oleh Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu harus ada penindakan yang dilakukan penyelenggara Pemilu terhadap pelanggaran-pelanggaran. Sebab, dikhawatirkan jika pelanggaran tersebut tidak dilakukan penindakan, maka akan muncul pelanggaran yang lain. Bahkan, pelanggaran tersebut akan dianggap sebagai hal yang lumrah.

“Begitu ada satu pelanggaran dibiarkan, maka pelanggaran lain akan menyusul lebih banyak lagi,” kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Sementara itu, Timnas AMIN menemukan adanya indikasi kecurangan Pemilu yang sangat sistematis dengan menggunakan perangkat desa atau Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai alat mereka. Ada beberapa momentum ASN terekam menyalah satu pasangan calon tertentu.

Kapten Timnas AMIN, Muhammad Syaugi, mengatakan, acapkali perangkat

kat desa dan ASN dilibatkan saat kampanye dari salah satu paslon. Apalagi, ada yang dengan sengaja menyeret perangkat desa dan ASN terlibat dalam pusaran politik praktis.

“Kita juga menyaksikan upaya yang dilakukan paslon tertentu untuk menyeret kepala desa masuk ke dalam pusaran politik dengan berbagai modus,” katanya, Rabu, 17 Januari 2024.

Timnas AMIN juga mencium adanya upaya untuk mengkriminalisasi terhadap perangkat desa dan ASN yang tidak memberikan dukungan kepada salah

satu paslon. Kriminalisasi itu, lanjut Syaugi, dilakukan dengan cara manipulasi dana desa, sehingga nantinya perangkat desa akan dianggap melakukan korupsi.

“Bahkan di antaranya ada dugaan upaya kriminalisasi melalui penyelewengan pengelolaan dana desa,” katanya.

Dia menambahkan, masih banyak perangkat desa dan ASN yang tetap menjaga netralitasnya. Namun, sangat disayangkan netralitas yang dipegang teguh oleh perangkat desa dan ASN tersebut dihancurkan dengan upaya kriminalisasi oleh oknum-oknum tertentu.

“Mereka yang diproses, diduga karena tetap mempertahankan netralitas dan independensinya dalam pemilu 2024,” terangnya.

Dia meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk lebih meningkatkan pengawasannya terhadap perangkat desa dan ASN agar tetap menjaga netralitasnya pada penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Kami juga menuntut kepada Bawaslu agar meningkatkan kualitas pengawasan dan menjamin netralitasnya,” katanya.

Dia juga meminta kepada Bawaslu untuk bekerja secara profesional. Selain itu, tidak segan-segan untuk memproses perangkat desa atau ASN yang tidak berlaku netral.

“Kami ingin Bawaslu bekerja profesional dan imparial demi berjalannya pemilu yang berintegritas,” ujarnya.

Selain itu, Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu harus menjaga kepercayaan masyarakat. Kata Syaugi, jika penyelenggara Pemilu akan ikut-ikutan berpolitik, maka pesta demokrasi ini akan berjalan berat sebelah.

“Kami tidak ingin kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu akan pudar manakala tugas mulia mengawal pemilu ini tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh, profesional, dan independen,” tandasnya. ●RDO





PRABOWO DIDUKUNG 9 NAGA

Sepertiga penyumbang perekomian Indonesia siap memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Pernyataan itu disampaikan Pengusaha nasional, Garibaldi Thohir atau yang akrab disapa Boy Thohir dalam acara Relawan Erick Thohir Alumni Amerika Serikat (ETAS) di Jakarta, Senin, 22 Januari 2024.

“Walaupun kami jumlahnya sedikit, tetapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini. Jadi kalau mereka-mereka mulai dari Djarum Grup, Sampoerna Grup, Adaro Grup, siapa lagi, pokoknya grup-grup,” kata Boy melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Boy Thohir mengatakan, dirinya ingin Indonesia memiliki pemimpin yang baik. Atas dasar itu, ETAS memutuskan untuk memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran.

“Tentunya dengan semangat bersama-sama kita ingin mempunyai pemimpin yang baik untuk republik,” jelasnya.

Pada acara ETAS, ada beberapa tokoh pebisnis dan politiknya yang hadir, di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Rosan Perkasa Roessler, Bernandino Moningga Vega hingga Maruarar Sirait. Dalam acara itu juga hadir langsung Prabowo Subianto.

Pada kesempatan tersebut, Prabowo Subianto bernostalgia lagu-lagu favoritnya yang dibawakan di tengah sesi jamming acara relawan tersebut. Awalnya, Prabowo diundang untuk menyanyi. Namun, ia mengungkapkan dirinya adalah generasi musik tahun 60-an seperti The Beatles.

“Kalau saya dari (tahun) 60-an,” katanya.

Prabowo sempat terkejut saat ditembangkan lagu favoritnya di era 60-an, yakni “Have You Ever Seen The Rain” dari band rock asal AS, Creedence Clearwater Revival. Tampak Prabowo yang saat itu mengenakan jas berwarna hitam sembari mengobrol dan meladeni permintaan swafoto dari para tamu alumni. Dia langsung antusias dan bernyanyi mengikuti lirik awal hingga refrain lagu.

Tak hanya itu, dia juga kembali bernostalgia musik era 60-an saat dibawakan lagu “Hey Jude” The Beatles. Prabowo menikmati ketukan nada sampai mengangkat tangannya ketika beralih ke lagu The Beatles berikutnya yang bertempo cepat, yakni “I Saw Her Standing There”.

Sementara itu, analis politik Citra Institute Efriza mengatakan, wajar bila taipan ekonomi Indonesia mendukung pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres.

Sebab, berdasarkan data dari lembaga survei, elektabilitas Prabowo-Gibran tertinggi dibandingkan Ganjar

Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

“Maka wajar, jika para pengusaha condong mendukung kepada Prabowo-Gibran. Ini karena faktor elektabilitas Prabowo yang tinggi, hingga kini elektabilitas Prabowo belum terkoreksi menurun secara dratis, malah cenderung meningkat meski di debat capres Prabowo kurang memukau,” katanya.

Disampaikan Efriza, pengusaha juga memahami siapa dibalik Pranowo karena adanya penguasa politik yakni Presiden Jokowi sebagai king maker dari pasangan ini.

“Posisi Prabowo kuat juga didukung fakta, kepuasan kepada pemerintahan Jokowi masih tetap tinggi. Posisi dua capres lainnya jika dicermati juga bagian dari pemerintah. Jadi secara sederhana, ketiganya bagian pemerintah, lebih baik mendukung pasangan yang memang didukung penuh oleh penguasa politiknya,” katanya.

Efriza menilai, pengusaha kelas kakap tentu memahami mereka merasa perlu mendukung keberlanjutan pembangunan. Keberlanjutan pembangunan adalah hal yang saat ini dinilai tepat, karena meski pembangunan infrastruktur penuh dengan pro dan kontra, tapi menguntungkan bagi para pengusaha.

“Matematika pengusaha kakap adalah selain untung dan rugi adalah peluang menangnya tinggi,” ujarnya.

Tak bisa dielakkan selama ini mereka sudah mendapatkan kenyamanan dengan diberikannya perlindungan ekonomi dari kebijakan Jokowi.

“Meski hal ini

perlu ditelusuri lebih dalam, perlu adanya penelitian lanjutan, tapi tanpa adanya perlindungan ekonomi, maka hal umum bahwa pengusaha tentu berpikir dan merenung lebih lama untuk memberikan dukungannya,” katanya.

Kata Efriza, para penguasa dari 9 Naga juga punya kalkulasi untung-rugi. Misalnya, jika mendukung Anies Baswedan yang sudah terlebeli dengan basis Islam kanan, basis kekuatannya juga pendukung fanatik yang kerap dinilai arogan.

“Malah akan membahayakan iklim usaha. Apalagi ditengarai mereka juga menilai dengan posisi Anies yang non-partai, sedangkan sosok Cak Imin secara personal juga tidak dapat meyakinkan para pengusaha akan iklim dunia usaha ke depan akan lebih dapat terjamin,” tuturnya.

Sedangkan jika mendukung Ganjar Mahfud, tentu saja faktor Mahfud yang keras pendirian dinilai susah untuk diajak berkompromi.

“Ia juga memiliki pemahaman yang amat tinggi mengenai regulasi, tentu saja para pengusaha khawatir akan bisnis mereka ke depannya. Sementara dari sisi capresnya Ganjar juga tak menyakinkan bahwa ia akan mampu berpihak kepada para pengusaha,” katanya.

“Sedangkan jelas, ada hal yang dituju oleh pengusaha kelas kakap, seperti proyek IKN. Proyek IKN jelas telah melibatkan pembangunannya kepada mereka,” sambungnya.

Efriza menyampaikan, jika 9 Naga dipersepsikan sebagai pengusaha kelas kakap. Maka jelas simbol hubungan yang melekat lebih baik kepada Prabowo. Sebab, Prabowo lebih dekat jika tak ingin disebut identik sebagai simbol kekuatan Orde Baru.

Perdebatan soal orde baru atau reformasi telah menyusut, Prabowo saat ini sedang diterima oleh masyarakat secara luas juga lagi berkelindan bersama Jokowi untuk bekerjasama mengedepankan kepentingan keberlanjutan program strategis nasional.

“Sehingga bukan hal yang mengagetkan bahwa para pengusaha kelas kakap memilih mendukung Prabowo. Dengan argumentasi peluang menang tinggi, didukung penguasa politik saat ini, kepuasan masyarakat kepada pemerintah masih tinggi, keberlanjutan pembangunan juga lebih dapat diterima ketimbang menerka kebijakan pemimpin yang baru, wajar akhirnya para pengusaha kelas kakap banyak memilih mendukung pasangan Prabowo-Gibran,” tandasnya. ●RDO



“Enggak lah,
tidak ada
hubungannya
dengan menyapu
jejak capres”

Ari Dwipayana

GANJAR DIBUNTUTI JOKOWI

Pergerakan kampanye yang dilakukan Ganjar Pranowo dinilai mendaatkan tantangan karena berhadapan dengan penguasa. Bahkan, Presiden Joko Widodo diduga membuntuti calon presiden nomor urut 03 itu di daerahnya berkampanye.

Pada 22 Januari 2024, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana berkunjung ke sejumlah daerah di Jawa Tengah, di antaranya Kota Salatiga. Padahal pada 15-17 Januari 2024, Ganjar Pranowo sudah lebih dahulu melakukan kunjungan dan kampanye di Jawa Tengah.

Biro Pers dan Sekretariat Presiden mengatakan bahwa banyak sekali masyarakat yang berdatang ke hotel di mana Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi menginap. Bahkan, sepanjang jalan di sekitar hotel sudah dipenuhi masyarakat yang ingin melihat Presiden Jokowi dan Ibu Negara.

Melihat antusias masyarakat, akhirnya Presiden Jokowi dan Ibu Negara turun dari mobil dan menyapa langsung masyarakat. Bahkan, Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk berfoto bersama masyarakat. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga memberikan beberapa hadiah kepada masyarakat.

“Tidak hanya menyapa, Presiden dan Ibu Iriana juga berswafoto dengan masyarakat serta memberikan hadiah berupa kaos dan tas pink yang berisi perlengkapan balita,” tulis keterangan Biro Pers dan Sekretariat Presiden itu.

Dalam keterangan tersebut disebutkan bahwa Presiden selama lawatannya di Jawa Tengah juga memberikan bantuan sosial dan bantuan pangan kepada masyarakat. Selain itu, Presiden Jokowi terjadwal juga untuk meresmikan beberapa infrastruktur dan menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat. Selanjutnya, Presiden Jokowi bersama rombongan juga menghadiri apel santri dan pelajar di daerah yang berbeda.

Sementara, Ganjar Pranowo sempat menyinggung adanya sosok yang saat ini sedang mengikuit jejaknya ke Jawa Tengah saat dirinya melakukan kampanye di daerah tersebut. Ganjar Pranowo tercatat telah melakukan kampanye di Jawa Tengah selama satu pekan.

“Kita lihat saja, apa-

kah selama saya kunjungan di Jateng ini nanti akan ada yang ikut berkunjung di sini, kita lihat beberapa hari lagi,” kata Ganjar di Kendal, Rabu, 17 Januari 2024.

Ada beberapa wilayah di Jawa Tengah yang dikunjungi Ganjar Pranowo di antaranya; Banjarnegara, Purbalingga, Kendal, dan Pekalongan. Selain itu, Ganjar Pranowo juga sempat melakukan lawatan ke Banyumas, Cilacap, Brebes, dan Tegal. Kunjungan Ganjar di wilayah itu guna untuk melakukan kampanye karena saat ini penyelenggaraan Pemilu sudah masuk tahapan tersebut.

Tercatat ada beberapa lokasi di mana Presiden Jokowi melakukan lawatan ke daerah yang se-

lumnya didatangi mantan Gubernur Jawa Tengah itu. Misalnya, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua, tepatnya di Sorong. Ganjar Pranowo menilai bahwa kunjungan Presiden Jokowi dan rombongan merupakan hal yang lumrah, karena bagian dari tugas negara.

Dia meyakini bahwa kunjungan Presiden Jokowi ke tempat yang sebelumnya didatanginya bukan untuk menggerus elektabilitasnya. “Ya Pak Jokowi kan weekend sering ketemu cucu sekaligus kunjungan kerja. Ya boleh, beliau presiden kok, mau kunjungan kerja ke mana pun boleh,”

kata Ganjar di Lapangan Expo Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Senin, 22 Januari 2024.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa dirinya dan partai pendukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 tetap menghargai Presiden Jokowi sebagai kepala negara. Dia juga tidak memersoalkannya. Bahkan, para pen-

dukung Ganjar-Mahfud sangat menyambut baik kunjungan Presiden Jokowi ke beberapa wilayah di Indonesia.

“Saya lihat videonya (kunjungan kerja Presiden Jokowi) disambut, kok. Kami dari PDI Perjuangan dan pendukung Ganjar-Mahfud, sayang kepada Pak Jokowi. Pada saat dia lewat, kami dadah-dadah ‘Pak Jokowi, kami dari Ganjar-Mahfud’. Menurut saya itu sapaan yang bagus, akrab, dan Pak Jokowi melambaikan tangan di situ,” katanya.

Ganjar lantas menambahkan bahwa iklim kompetisi pada saat perhelatan pesta demokrasi merupakan hal yang lumrah selama dilakoni dengan cara sehat.

“Enggak apa-apa. Kompetisi-kompetisi itu kami terbiasa, kok. Yang tidak boleh adalah yang tidak adil,” ucapnya.

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah kunjungan Presiden Jokowi ke Jawa Tengah untuk membuntuti Ganjar Pranowo. Dia menambahkan bahwa kunjungan Presiden Jokowi tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2024.

Dia mengatakan kunjungan Presiden Jokowi ke beberapa wilayah di Indonesia untuk memastikan perlindungan ke masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bantuan sosial atau bantuan pangan.

“Enggak lah, tidak ada hubungannya dengan menyapu jejak capres,” kata Ari saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 22 Januari 2024.

Ari mengatakan bahwa kunjungan Presiden Jokowi bukan untuk mengampanyakan salah satu pasangan calon. Dia menegaskan bahwa kunjungan Presiden Jokowi untuk memastikan program bantuan ke masyarakat tetap sasaran.

“Kampanye terjadi di seluruh tempat di Indonesia kan? Ini terkait dengan memastikan program-program prioritas. Bukan hanya bansos, tapi termasuk program Indonesia Sehat, Indonesia Pintar itu terlaksana,” pungkasnya..●RDO



“Upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita. Meninggalkan masyarakat adat kita. Menghasilkan konflik agraria”

Muhaimin Iskandar



NEGARA ABAIKAN PETANI DAN NELAYAN

Calon wakil presiden nomor urut 01, Muhaimin Iskandar, mendapatkan perhatian lebih pada debat keempat Pilpres 2024 yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Minggu, 21 Januari 2024.

dan merusak lingkungan. “Ini harus berhenti,” cetusnya.

Cak Imin menyebut, negara dan pemerintah saat ini abai terhadap nasib petani dan nelayan. Hal itu Cak Imin sampaikan saat memaparkan visi-misinya terkait pembangunan, energi, pangan hingga agraria, dalam debat cawapres.

Menurut Cak Imin, penyelesaian masalah pangan dengan food estate harus berhenti lantaran mengabaikan nasib para petani.

“Upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan

petani kita. Meninggalkan masyarakat adat kita. Menghasilkan konflik agraria,” ujar Cak Imin.

Cak Imin berpandangan, food estate bisa merusak lingkungan. Pasangan Anies Baswedan di Pilpres 2024 itu juga menyinggung soal masalah ekologi. Kata dia, negara harus serius mengatasi masalah krisis iklim dan bencana ekologi terjadi dimana-mana.

“Negara harus serius mengatasinya,” ucapnya.

Seharusnya, kata Cak Imin, pemerintah tidak mengandalkan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Sebab, hal itu tak mengatasi masalah. Menurut dia, solusinya mulai dari etika.

“Kita harus sadar bahwa krisis iklim kenyataan krisis iklim harus dimulai dengan etika. Sekali lagi etika,” katanya.

Pada tema perubahan iklim, Cak Imin menyodorkan sejumlah solusi guna menghadapi perubahan iklim ekstrem yang mengganggu produksi dan kualitas gizi pangan.

Menurut Cak Imin, tanpa krisis iklim pun petani di Indonesia tak memiliki air dan irigasi yang cukup. “Fatalnya lagi, program pengadaan pangan nasional tidak melibatkan petani. Justru melibatkan korporasi. Ini harus diubah,” katanya.

Cak Imin melihat potensi besar petani dan seluruh produknya yang luar biasa. Untuk itu, mereka menawarkan sejumlah solusi kepada petani.

“Mulai dari pengadaan lahan yang memadai, reformasi agraria, pupuk yang cukup. Petani punya uang yang cukup, tapi pupuknya tidak ada. Akhirnya beli di tengkulak,” kata Muhaimin.

“Potensi pupuk organik juga jadi perhatian. Kami juga akan memberikan program gagal tanam sehingga petani merasa aman bekerja. Tentunya kita juga menyediakan pupuk dan irigasi yang cukup,” janjinya.

Wakil
Ketua

DPR RI itu juga akan memberikan kesempatan kepada petani untuk mengisi kekurangan pangan nasional. Terkait hal ini, maka desa-desa bakal terlibat di dalamnya.

“Petani kita potensinya besar, potensi tanah subur besar, kebutuhan sebagai pasar atau suplai dan permintaan ada. Pemerintah jangan normatif, harus langsung turun tangan. Ini butuh kemauan politik,” tuturnya.

Sementara itu, pada sesi tanya jawab antara cawapres nomor urut 1 dan nomor urut 2, Muhaimin vs Gibran, berjalan seru. Keduanya berdebat tentang pembangunan berbasis bioregion atau bioregional. Namun pengertian bioregional antara keduanya berbeda. Alhasil Muhaimin vs Gibran mencoba saling menjatuhkan satu sama lain.

“Mas Gibran, Indonesia terdiri dari berbagai bioregional. Di mana kita harus mengerti agar pembangunan tepat sasaran dan tumbuh dengan baik,” katanya.

Kemudian ia mengajukan pertanyaan, bagaimana strategi Gibran melaksanakan pembangunan berbasis regional agar keadilan iklim terjaga, keadilan sosial terwujud, adil ekologi dan keadilan antargenerasi terwujud.

Tak langsung menjawab, Gibran justru menyerang Muhaimin di awal jawabannya. Ia menyebut Gus Imin lucu karena membahas soal lingkungan hidup tapi membawa botol kemasan plastik.

Menjawab pembangunan berbasis bioregional, putra Sulung Jokowi itu mengatakan, pasangan nomor urut 1 berkomitmen bahwa pembangunan tidak lagi Jawa sentris. Namun harus Indonesia sentris.

“Kemarin Gus tolak IKN, tidak apa-apa. Kita lanjutkan dan perkuat. Sekali lagi, yang namanya pembangunan yang masif harus memerhatikan aspek lingkungan sosial dan keberlanjutan,” ujarnya.

Gibran memastikan pembangunan yang digelar akan mencari titik tengah, titik keseimbangan. “Membangun hilirisasi industri tapi memerhatikan lingkungan hidup, menggenjot produktivitas petani, sektor maritim dengan keseimbangan alam,” paparnya.

Ia juga akan memastikan amdal, analisa lingkungan, sustainable report, dan menggandeng UMKM lokal.

Tetapi jawaban panjang lebar Gibran tak memuaskan Muhaimin. “Pertanyaan saya tidak terjawab. UU menyebut potensi bioregional adalah bahwa wilayah nasional bukan hanya politik administrasi politik. Namun ada ekosistem lingkungannya,” ujarnya.

Pembangunan Papua misalnya. Dia menyebut lingkungannya ada, komunitasnya tumbuh di sana. Mereka butuh basis pemerataan pembangunan yang adil.

“Maluku dengan kekuatan maritimnya, Jawa dengan menumbuhkan potensi ekonomi,” sebut Cak Imin. ●RDO

Dalam debat cawapres kali ini, Cak Imin langsung menyebut negara atau pemerintah tak berpihak kepada para petani dan nelayan. Hal itu terbuktikan melalui data-data hasil penelitian BPS Sensus Pertanian.

“10 tahun terakhir, hasil BPS Sensus Pertanian menyebut rumah petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya ada 16 juta rumah tangga gurem hanya memiliki lahan setengah hektare. Sementara ada seseorang yang mempunyai 500.000 hektare tanah sebagai kekuasaan yang diberikan oleh negara,” ungkap Ketua Umum PKB itu.

Cak Imin juga mengkritisi pengadaan pangan nasional melalui food estate yang mengabaikan petani dan masyarakat adat. Sehingga proyek nasional itu menghasilkan konflik agraria





“Dengan hilirisasi, kita akan keluar dari midle income trap, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, dan akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya”

Gibran Rakabuming Raka

LANJUTKAN HILIRISASI JOKOWI

Gibran Rakabuming Raka menegaskan akan meneruskan dan memperluas cakupan program hilirisasi yang saat ini dijalankan ayahnya, Presiden Joko Widodo, jika menang di Pilpres 2024.

“Tidak hanya di sektor tambang, tapi juga pertanian, maritim dan juga hilirisasi digital,” kata calon wakil presiden nomor urut 02 itu saat pemaparan visi misi dalam debat Cawapres Pilpres 2024, Minggu, 21 Januari 2024.

Gibran menegaskan, Indonesia tidak boleh lagi mengirim atau mengekspor barang mentah.

Selain hilirisasi, Wali Kota Surakarta ini juga menekankan adanya program yang mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Maka dari itu, pihaknya akan terus mendorong transisi menuju energi hijau seperti bioavtur, biodiesel dan juga bioetanol.

Gibran juga menyinggung potensi energi baru terbarukan. “Bisa mencakup 3.686 GW yang meliputi energi surya, angin, air, bio energi dan juga panas bumi. Oleh karena itu bekerja sama pentahelix wajib untuk didorong,” katanya.

Gibran meyakini, jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM, maka akan terbuka 19 juta pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan.

Sebanyak 5 juta di antaranya adalah green jobs. Ini merupakan peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan.

“Green job ini adalah trend peluang kerja masa kini dan masa depan,” katanya.

Gibran menegaskan kembali akan terus mendorong ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah. Tak hanya penyediaan pupuk dan bibit, Gibran juga menyinggung mekanisasi agar produktivitas petani meningkat.

Gibran akan terus mengoptimalkan peran PPID, ID Food, Bulog hingga Badan Pangan dalam tugasnya menjaga kestabilan harga pangan. Menurutnya, langkah tersebut berguna untuk mendorong kesejahteraan petani. Dia juga mendorong generasi muda akan kita dorong melalui smart-farming.

Agenda reforma agraria juga akan berlanjut terkait kepemilikan tanah dan juga pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan.

Tak lupa, anggaran dana desa juga akan terus berkelanjutan. Pasalnya, menurut Gibran, hal itu sudah terbukti menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan angka desa berkembang dan mandiri.

“Oleh karena itu, anggaran dana desa akan ditingkatkan sesuai dengan kekuatan fiskal di dalam negeri. Narasi besar keberlanjutan dan penyempurnaan,” katanya.

Gibran mengatakan bahwa untuk menumbuhkan sense of belongings atau rasa memiliki terhadap desa dapat mengurangi keinginan masyarakat pergi dari wilayah tersebut. Gibran lantas memberi contoh sebuah desa wisata di Mojokerto, Jawa Timur, yang dibangun dengan crowd funding.

“Jadi masyarakat desa punya saham di destinasi wisata tadi,” katanya. Dengan adanya usaha bersama di dalam desa, seperti desa wisata, harapannya masyarakat tidak lagi melakukan urbanisasi.

Gibran juga membahas soal pembangunan rendah karbon yang berkeadilan. Dirinya ingin mendorong energi hijau. Menurutnya, penggunaan energi fosil lambat laun perlu dihilangkan.

“Kita tidak boleh lagi bergantung pada energi fosil, kita dorong terus energi hijau yang berbasis bahan baku nabati seperti bio ethanol, bio avtur, bio diesel,” katanya.

Dia mengatakan dengan adanya B35 dan B40 sudah membantu Indonesia untuk menekan penggunaan minyak. “Sudah mampu menurunkan nilai impor minyak kita,” katanya.

Di sisi lain, kata Gibran, dengan adanya B35 dan B40 akan meningkatkan nilai produksi sawit di dalam negeri. “Meningkatkan nilai tambah produksi sawit di dalam negeri dan juga lebih ramah lingkungan,” katanya.

Gibran mengatakan untuk mewujudkan pembangunan bebas karbon, pemerintah harus mencari solusi yang tepat. Putra Presiden Jokowi itu ingin meningkatkan hilirisasi industri dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. “Kita ingin menggenjot hilirisasi industri tapi juga kita wajib menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Dia mengatakan bahwa dirinya ingin meningkatkan produktivitas para petani dan memanfaatkan potensi maritim di Indonesia.

“Kita ingin meningkatkan produktivitas petani dan juga sektor maritim tapi kita juga wajib menjaga keseimbangan alam,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, kata Gibran, harus memperhatikan analisis dampak lingkungan (Amdal).

“Jangan sampai ada alih fungsi lahan yang sekiranya merugikan pengusaha lokal, UMKM lokal atau pun masyarakat adat setempat,” katanya.

Gibran juga ingin mendorong agar RUU Masyarakat Adat segera disahkan DPR. “Ini masih kita usahakan untuk didorong,” katanya.

Dia menyampaikan bahwa pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada masyarakat adat selama ini.

“Sudah ada Perpres 28/2023, ini sudah ada satu tengah juta hektare hutan adat yang sudah diakui,” katanya.

Oleh karena itu, perlu berdialog dan edukasi kepada masyarakat adat terkait dengan rencana pembangunan.

“Kita harus perbanyak dialog dengan para tokoh adat, kepala adat, tokoh masyarakat setempat,” ujarnya.

Dia mengatakan bahwa masyarakat adat perlu dilibatkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah.

“Justru harus dirangkul dan diberikan manfaat yang sebesar-besarnya terutama untuk masyarakat lokal, pengusaha lokal, UMKM lokal, dan termasuk masyarakat adat setempat,” ujarnya.

Selain itu, Gibran juga bicara soal memperkuat program reforma agraria. Dirinya akan memperkuat dan memperbaiki soal regulasi yang berkaitan dengan reforma agraria di Indonesia.

Gibran menjelaskan, saat ini pemerintah sedang gencar menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). “Sekarang sudah ada program PTSL, sudah berhasil membagikan sekitar 110 juta sertifikat,” katanya.

Gibran membandingkan pasca program PTSL dijalankan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, program tersebut sangat berhasil. “Dulu sebelum ada program ini hanya bisa menghasilkan dan membagikan 500.000 sertifikasi. Bayangkan itu, butuh berapa untuk menyelesaikan masalah,” sambungnya.

Gibran mengatakan saat ini pemerintah juga tengah menggenjotkan redistribusi tanah, di mana tanah yang berstatus HGU akan disimpan di bank tanah. “Untuk nanti distribusi ulang, misalnya kepada para pengusaha lokal, petani lokal, dan lain-lain,” ucapnya.

Pada sesi akhir debat, Gibran kembali mengingatkan pentingnya hilirisasi.

“Dengan hilirisasi, kita akan keluar dari midle income trap, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, dan akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya,” katanya.

Meski ngotot dengan hilirisasi, Gibran masih tetap menyebutkan pentingnya aspek lingkungan keberlanjutan dan sosialnya.

“Dampak perubahan iklim semakin nyata, banjir, kekeringan, kenaikan air laut ini adalah ancaman nyata dan sudah di depan mata,” ujarnya.

Menurutnya hal ini merupakan tantangan zaman now yang membutuhkan solusi zaman now. Inti tantangannya yakni bagaimana mencari titik tengah keseimbangan. Melanjutkan hilirisasi namun tetap wajib menjaga lingkungan.

“Tingkatkan produktivitas pertanian dan sektor maritim tapi wajib menjaga keseimbangan alam,” katanya.

Tak lupa, dia pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Mahfud MD dan Muhaemin Iskandar. “Semoga debat malam ini memberi gambaran tentang kemana arah bangsa ini melangkah,” tandasnya.●RDO

“Konstitusi kita juga menyatakan bahwa sumber daya alam itu harus dikelola dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”



Mahfud MD

KAYA SUMBER DAYA ALAM INDONESIA SULIT BERDAULAT

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD, menyatakan ada tiga hal penting yang akan menentukan masa depan Indonesia di masa depan, yakni Tuhan, manusia, dan alam.

Hal itu diungkapkan Mahfud saat memaparkan visi misi pada debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Minggu, 21 Januari 2024.

Selain ketiga hal tersebut, Mahfud juga menyampaikan mengenai kearifan lokal. Dalam kearifan lokal ini, bangsa Indonesia sudah biasa melakukan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan atas lingkungan hidup agar lestari. Sesuai dengan konstitusi, sumber daya alam harus dikelola dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dengan sumber daya alam yang kaya, tapi Indonesia belum berdaulat pangan, petani makin sedikit, lahan pertanian makin sedikit, tapi subsidi pupuk makin besar. Menurut Mahfud, pasti ada yang salah terkait hal ini.

“Sumber daya alam kita sangat kaya, tapi pangan belum berdaulat, petani makin sedikit, lahan pertanian makin sedikit, tapi subsidi pupuk makin besar, pasti ada yang salah, petaninya sedikit, lahannya sedikit kok subsidiya setiap tahun makin naik, pasti ada yang salah,” katanya.

Mahfud kemudian menyampaikan kalau laut kita berlimbah, udara kita merancuni paru-paru. Sementara investor masuk untuk industrialisasi, tapi yang terjadi lingkungan rusak. Rakyat menderita, kemudian sumber daya alam menjadi sumber sengketa antara rakyat dengan rakyat, rakyat dengan pemerintah.

Mahfud sempat menyampaikan ayat Alquran tentang masalah ini. Dan terkait hal ini, kuncinya adalah komitmen dan keberanian.

Saat menjadi Ketua MK, Mahfud telah mengambil keputusan bahwa sumber alam itu untuk memihak rakyat. Mulai dari pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat, dan penghormatan atas pewarisan dari leluhur.

“Kami akan gunakan tolok ukur itu, tapi saya tidak melihat pemerintah tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan ini untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita, maka kami punya program

petani bangga petani, di laut jaya nelayan sejahtera, jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar saja, rugi dong kita,” katanya.

Mahfud menyampaikan bagaimana Indonesia saat ini belum berdaulat dalam bidang pangan. Masifnya industrialisasi yang mendorong masuknya investor justru ikut mendorong lingkungan menjadi rusak.

“Konstitusi kita juga menyatakan bahwa sumber daya alam itu harus dikelola dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ujar Mahfud.

Mahfud lantas menyebut bahwa pada 16 Juni 2011, ketika menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), ia pernah memutus perkara yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Menurut Mahfud MD, ada empat tolok ukur mengenai SDA yang harusnya memihak kepada rakyat. Mulai dari pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan oleh leluhur.

Namun, dengan tolok ukur itu, pemerintah belum melakukan upaya-upaya untuk melestarikan lingkungan. “Saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah apa sih yang diperlukan Ini untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita,” katanya. “Maka kami punya program petani bangga bertani, di laut jaya nelayan sejahtera,” katanya.

Di sisi lain, Mahfud juga menyampaikan soal penyerobotan lahan yang se-

ini justru berlandung di balik aturan. Hal ini disampaikan Mahfud MD untuk menjawab pertanyaan soal solusi mengatasi pembalakan dan perampahan lahan secara liar.

Mahfud menyampaikan bahwa penyelesaian sumber daya alam dan energi harus diselesaikan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Tentu juga dengan keterbukaan informasi agrarian, termasuk kehutanan.

“Ini punya pengalaman dalam sidang-sidang tentang ini, informasinya tertutup, siapa-siapa yang punya lahan ilegal, ketika dibuat daftar enggak ada di dalam daftar. Karena kemudian atas nama keterbukaan informasi

publik, mereka sampaikan ‘ini rahasia, nggak bisa dong’, rahasia itu kan bukan yang tentang data perampasan tanah-tanah rakyat, kasus-kasusnya di mana, siapa yang menyerobot lahan sawit, itu kan data-datanya harus lengkap,” katanya.

“Setelah diselidiki, itu memang permainan buruk sehingga selalu disembunyikan. Kalau orang tahu baru dikeluarkan satu-satu, tidak ada ada penyelesaian yang menyeluruh, ini jadi penting, keterbukaan informasi tentang data-data,” sambungnya.

Dalam tema masyarakat adat, Mahfud merasa terkejut bahwa masih ada 20 ribu masyarakat adat yang hidup di hutan Kalimantan Timur tidak bisa memilih. Kata Mahfud, masalahnya justru sederhana, hanya karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Mereka yang tinggal di hutan Kaltim dianggap bukan masyarakat adat karena tinggal di hutan negara. Karena itu, mereka tidak bisa memiliki KTP.

“Karena katanya dia menghuni hutan negara, kalau hutan negara nggak boleh ada penduduk di situ. Padahal dia sudah puluhan tahun ada di situ,” ujarnya.

Hal ini disampaikan Mahfud untuk menjawab pertanyaan bagaimana strategi untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat, mengingat banyak kebijakan agraria sering tanpa persetujuan masyarakat adat dan merampas wilayah mereka.

Menurut Mahfud, harusnya memang tidak ada satupun masyarakat yang tertinggal. Karena itu, penertiban birokrasi pemerintah dan aparat hukum perlu dilakukan. Masih banyak mereka yang tidak mau melaksanakan aturan tersebut.

“Empat hari lalu, ketika kami ketemu di KPK, saya ulangi, KPK mengatakan itu banyak tuh izin-izin tambang sudah dicabut oleh Mahkamah Agung, tidak dilaksanakan sampai satu tahun setengah,” RDO





“Gunakan hak pilih sebaik-baiknya karena kesan pertama kita memilih itulah yang tidak akan kita lupakan. Oleh karena itu, gunakan kesempatan pertama ini dengan sebaik-baiknya”

Agus Fatoni

PEMILIH PEMULA JANGAN GOLPUT

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengingatkan seluruh pemilih pemula, khususnya siswa-siswi kelas XII SLTA se-Sumsel untuk menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.

Hal tersebut diungkap dalam kegiatan Pendidikan Politik Pemilih Pemula bagi Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Se-Sumsel di Gedung Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan, Kamis 18 Januari 2024.

“Gunakan hak pilih sebaik-baiknya karena kesan pertama kita memilih itulah yang tidak akan kita lupakan. Oleh karena itu, gunakan kesempatan pertama ini dengan sebaik-baiknya,” kata Fatoni.

Fatoni menegaskan, peran generasi muda sangat penting dalam memilih pemimpin untuk masa depan bangsa, negara dan daerah.

Mengingat siswa-siswi kelas XII di Sumsel memiliki jumlah yang cukup besar yaitu 18,84% dari total pemilih di Sumsel.

“Pemilih di Sumsel ini 18,84 persen atau sebanyak 1.192.024 merupakan generasi Z atau pemilih pemula. Oleh karena itu adik-adik kalian sangat berperan dalam menentukan keberlangsungan bangsa kita satu suara dari kalian sangat berarti,” ujarnya.

Fatoni juga mengingatkan para pemilih agar tidak golput dan terprovokasi terhadap berita bohong (hoax) yang akan menimbulkan konflik di masyarakat.

“Pada pemilihan pertama ini nanti kalian akan memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan di akhir tahun nanti ada pemilihan kepala daerah yakni Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota. Untuk itu saya berharap adik-adik kalian tidak memilih golput, hindari politik uang, jangan terpengaruh pada berita hoax dan ikut menyebarkan,” jelas Fatoni.

Kemudian, Fatoni menegaskan untuk menjaga kondusifitas daerah selama tahun politik berlangsung. Dia juga berharap agar siswa-siswa SLTA dapat menjaga status zero konflik di Sumsel.

“Kita harus bisa menjadi contoh daerah yang sukseskan Pemilu, Pilkada dengan damai dan sukses komitmen ini kita harus jaga bersama jaga kondusifitas



di Sumsel ini kita pertahankan zero konflik,” ucap Fatoni.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel H Alfajri Zabidi menyebut kegiatan ini menjadi salah satu upaya menyukseskan Pemilu dan Pilkada di Sumsel.

“Kegiatan kita hari ini kita laksanakan dengan menindaklanjuti program prioritas Penjabat Gubernur Sumsel yang ingin pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 di Sumsel berlangsung sukses dan damai,” kata Alfajri.

Turut hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan, Plt. Sekretaris KPU Sumsel Eko Iswanto, mewakili Kapolda Sumsel Dir Intelkam Polda Sumsel, Kombes Pol Iskandar F Sutisna, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumsel H Syafitri Irtan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumsel Prof Aflatus Muchtar dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Sumsel Mal'an Abdullah.

Sebelumnya, Agus Fatoni memimpin langsung deklarasi secara serentak netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumsel.

Ikrar netralitas ASN dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan SA Supriono diikuti oleh Bupati/Walikota se-Sumsel dan secara daring diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sumsel.

Usai pembacaan deklarasi, dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pakta integritas netralitas ASN secara serentak se-Sumsel.

Agus Fatoni mengapresiasi diselenggarakannya deklarasi netralitas yang diikuti 180.751 ASN serentak se-Sumsel.

Fatoni juga menegaskan bahwa netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada merupakan kewajiban yang harus dipegang teguh.

Sementara itu, KPU dan Bawaslu dalam hal ini sebagai penyelenggara

pemilu juga harus didukung penuh.

“Bupati, Walikota dan seluruh ASN telah berkomitmen menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Terutama kepada ASN ini adalah atensi yang harus kita taati dan menjadi komitmen kita bersama,” ujarnya.



ya.

Oleh karena itu, Fatoni mengimbau agar Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk terus mendukung agar pesta demokrasi di Sumsel ini berjalan dengan aman, damai dan lancar.

Menurutnya, dengan kerjasama yang baik akan mewujudkan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 mendatang berjalan sukses.

“Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota serta Forkopimda pasti mendukung KPU dan Bawaslu menjalankan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Sumsel agar berjalan dengan lancar. Dengan kerja bersama kita yakin apa yang kita harapkan membuat Sumsel semakin maju terwujud,” kata Fatoni.

Dalam kesempatan itu, Fatoni berpesan kepada semua kepala daerah tetap menjaga status Sumsel sebagai daerah yang zero konflik.

Dia berharap jalannya Pilkada Serentak 2024 di Sumsel berlangsung sukses agar bangsa dan daerah menjadi jauh lebih baik lagi.

“Namanya pesta demokrasi ini harus dilakukan dengan gembira jangan menjadi beban. Harus dilaksanakan sepenuh hati dan sebisa mungkin kita jaga dan pertahankan lingkungan agar tidak terjadi perpecahan,” kata Fatoni.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Ir. SA Supriono mengingatkan jajaran ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk tetap menjaga netralitas menjelang tahun politik 2024.

“Di tahun 2024 akan ada dengan tiga pemilu yaitu legislatif, presiden dan kepala daerah.

Kita harus bersikap netral meskipun kita juga tetap menjalankan tugas sebagai warga negara Indonesia untuk memilih,” tutur nya.

Dikatakan, ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sumsel harus mampu menempatkan diri pada posisi yang sesuai dengan postur yang telah dituangkan di dalam regulasi.

“Jika kita diatur untuk netral, maka wajib bersikap netral,” tambahnya.

• IRY

“Kita tetap tegak lurus dengan perintah partai, salah satunya mendukung Prabowo-Gibran dalam visi, misi dan program yang akan direalisasikan”

Dany Desrandy



PRIORITAS PENURUNAN STUNTING DI PALEMBANG

Dengan motivasi untuk kesejahteraan masyarakat, Dany Desrandy Shariff maju sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Kota Palembang Dapil 5 Kecamatan Plaju dan Seberang Ulu II.

Pria kelahiran 21 Desember 1986 ini ingin menjadikan jabatan legislatif sebagai jembatan dan akses untuk bisa menyerap aspirasi masyarakat Kota Palembang, hingga akhirnya bisa direalisasikan.

Majunya Dany sebagai Caleg DPRD Kota Palembang dari Partai Gerindra tegak lurus dengan perintah partai yakni akan mensupport program yang sudah disampaikan oleh Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Kita tetap tegak lurus dengan perintah partai, salah satunya mendukung Prabowo-Gibran dalam visi, misi dan program yang akan direalisasikan jika terpilih sebagai Prsiden RI 2024,” katanya, saat menjadi bintang tamu podcast Info Indonesia, Senin 22 Januari 2024.

Dijelaskan alumni Universitas Sriwijaya (Unsri) ini, salah satu program yang akan dijalankan adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini ada program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak.

“Tujuan dalam program ini agar bisa sehatkan anak-anak sehingga mampu memiliki daya saing tinggi dan tidak kalah dari anak-anak di luar negeri,” jelasnya.

Hingga, jika anak-anak Indonesia sehat dan tercukupi dengan gizi yang baik bisa lebih siap untuk diajak berkerjasama dalam mewujudkan visi, misi dan program yang telah di rancang.

“Jika pada konsepnya ini bicara Indonesia, tingkat stunting masih tinggi, artinya pemerataan diseluruh wilayah Indonesia, termasuk di Palembang dan Sumsel,”ungkapnya.

Ditegaskan Dany, Sumsel dan Palembang termasuk daerah yang harus jadi prioritas dalam penurunan hingga penghapusan angka stunting.

“Angka stunting di Palembang masih terbilang cukup tinggi sehingga harus diperbaiki dan program ini akan dilaksanakan setelah Prabowo terpilih menjadi Presiden RI dan saya lolos men-

jadi anggota DPRD Kota Palembang,”ulasnya.

Dalam artian, penurunan dan penghapusan angka stunting di Palembang menjadi prioritas utama dirinya maju sebagai Caleg DPRD Kota Palembang 2024.

Ayah tiga anak ini menyebut tingginya angka stunting di Palembang disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi.

“Maka yang harus diperbaiki adalah ekonominya dulu dan angka stunting bisa ditekan dan dihapus-

kan. Maka hal ini sejalan dengan program, visi dan misi Prabowo Gibran,” tambahnya.

Bergabungnya Dany dalam dunia politik diakuinya berasal dari dukungan dan kemauan masyarakat, mengingat Dany bukanlah seseorang yang rajin berorganisasi. Tapi, paling suka bersosialisasi.

Pada tahun 2015, Dany menerima ajakan ikut sayap partai Gerindra di Tunas Indonesia Raya (TIDAR) dan menjadi sekretaris TIDAR Kota Palembang.

“2015 itu, saya menjadi sekretaris TIDAR Kota Palembang,” sambungnya.

Setelah dilantik sebagai

notaris, Dany merasakan perlu adanya jaringan, punya banyak teman dari berbagai elemen, sehingga bisa menyalurkan bantuan terhadap yang membutuhkan.

Hingga pada tahun 2019, dirinya didorong atas kemauan masyarakat di Dapil untuk mencalonkan diri di DPR Kota Palembang sebagai kader Partai Gerindra.

Dirinya dan Partai Gerindra memiliki persamaan konsep dan pandangan terhadap pemimpin-pemimpin bangsa yang dapat memberikan jiwa dan raganya kepada negara Indonesia.

“Jika kita bicara ideologi dan hati, itu persamaan konsep dan pandangan saya dengan Partai Gerindra terhadap pemimpin-pemimpin bangsa,” jelasnya.

Bahkan, dirinya ikut mengutip perkataan mantan Presiden RI, B.J. Habibie yang menyebut bahwa orang yang paling keras itu adalah Prabowo Subianto. Hal yang sama juga pernah diungkap Abdurrahman Wahid atau Gusdur yang menyebut Prabowo adalah orang yang dapat memberikan jiwa dan raganya kepada negara Indonesia.

“B.J. Habibie mengatakan orang yang paling keras itu adalah Prabowo, Gusdur juga mengatakan orang yang paling dapat memberikan jiwa dan raganya kepada negara Indonesia adalah Prabowo. Jadi jiwa patriotiknya tidak bisa diragukan,” tegasnya.

Tidak hanya itu, hal serupa juga pernah diungkap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengangumi sifat patriot dan cinta negara yang dimiliki Prabowo Subianto.

“Hingga pada akhirnya, saya anggap Partai Gerindra ini memiliki satu visi dan misi,”tegasnya.

Dany meyakini bahwa Capres dan Cawapres, Prabowo Gibran akan berhasil mendulang suara diatas 65 persen di Sumsel. Artian, dirinya meyakini bahwa pasangan Prabowo Gibran akan berhasil lolos dalam satu putaran Pilpres 2024.

“Untuk suara di Sumsel, saya meyakini bahwa Prabowo Gibran akan mampu menghasilkan suara diatas 65 persen,” jelasnya.

Diungkapkan Dany, pasangan Prabowo Gibran menyampaikan bahwa semua elemen masyarakat, baik pusat, daerah hingga desa memberikan kepercayaan dan mandat untuk menjadi Prsiden RI 2024.

Dengan program yang menyentuh masyarakat akan tetap dijalankan bahkan akan ditambah dengan program-program baru yang berpihak kepada masyarakat.

“Prabowo Gibran menyampaikan bahwa semua elemen masyarakat, pusat daerah hingga desa untuk memberikan kepercayaan dan mandat untuk menjadi Presiden RI 2024,”pungkasnya. ●IRY



“Janji saya untuk Muba, jalan-jalan rusak akan diaspal, penerangan semakin merata, menghidupkan sisi wisata dari religi dan wisata alam bisa memperkenalkan Muba lebih luas”

MH Yasser Arafat

INGIN MAJUKAN DAERAH

Meski pekerjaan yang digelutinya saat ini sudah cukup mapan dan sesuai dengan bidangnya yakni kepariwisataan namun tidak membuat MH Yasser Arafat berpuas diri. Ada panggilan hati yang membuat dia berani mundur dari pekerjaannya dan memilih mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2024 ini.

Berangkat dari keprihatinannya kepada daerah asal atau kampungnya, cicit dari Pangeran Abdul Hamid asal Desa Marga Dawas Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Yasser Arafat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tergerak hatinya untuk mencalonkan diri sebagai Caleg untuk DPRD Sumsel..

Yasser Arafat menyebutkan kampung halamannya Muba adalah kabupaten terkaya di Sumatera Selatan (Sumsel), tetapi kondisi dirasakannya sangat memprihatinkan. Sentuhan pembangunan masih terasa kurang terutama soal jalan dan infrastruktur lainnya.

Melalui pengalamannya dalam sisi marketing dan promosi, dia optimis bila menjadi wakil Muba di legislatif bisa membuat kampung halaman lebih sejahtera kedepannya dibandingkan kondisi sekarang.

“Kepada masyarakat Musi Banyuasin, Muba yang saya cintai, ingin menyampaikan akan memberikan yang terbaik untuk kampung halaman saya. Tolong percaya kepada saya Koyong Yasser untuk maju dari kader PPP menjadi wakil Muba di DPRD Provinsi,” kata pria yang banyak malang melintang di dunia perhotelan ini.

Menurut mantan Marketing PT Sriwijaya Optimis Mandiri (SOM) selaku pengelola klub Sriwijaya FC, dia bisa mendatangkan sponsor untuk membayar gaji miliaran rupiah semua pemain bintang di era keemasan Laskar Wong Kito.

Berangkat dari itu dia optimis juga bisa mendatangkan uang dari investor membuat kampung halamannya Muba sejahtera apabila dia dipercaya masuk ke kursi legislatif.

“Rencananya akan saya masukan banyak investor untuk membangun Muba seperti saya bisa mengurus SFC di era keemasannya saya tim marketingnya saat itu,” ucapnya.

Dilanjutkannya dia berjanji akan banyak membuat perubahan khususnya infrastruktur agar Muba lebih menarik untuk dikunjungi semua orang dan lebih maju kedepannya. Selanjutnya kemajuan itu pasti seiring sejalan serta berdampak besar dengan ikut meningkatkan ekonomi

penduduk Muba karena efek tersebut.

“Janji saya untuk Muba jalan-jalan rusak akan diaspal penerangan semakin merata menghidupkan sisi wisata dari religi dan wisata alam bisa memperkenalkan Muba lebih luas. Semua itu juga akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Muba,” tuturnya.

Dia bercerita hampir semua wilayah di dapilnya Muba sudah didatangi Yasser mengaku menemui semua penduduk tanpa diwakilkan oleh tim sukses.

Dia datang bahkan banyak bertemu dengan penduduk Muba yang mengalami banyak kesulitan hidup. Kedatangan berdampak positif setelah visi dan misinya disampaikan semua orang yang ditemuinya meminta untuk menjalankan misinya membangun Muba.

“Saya hanya ditemani dua orang tim saja tidak banyak. Ada orang ribuan tim sukses datang ke wilayah Dapil mereka diwakili, saya tidak langsung bertemu mereka. Alhamdulillah sambutan penduduk Muba baik mereka malah senang karena melihat sendiri calon legislatif yang akan

menjadi wakil Muba di Provinsi,” jelasnya.

Saat kunjungan Yasser menyebutkan dia memberikan berbagai cinderamata seperti hijab, baju, kalender dan kopi yang ditempelkan foto dirinya agar penduduk Muba selalu terkenang ketika tanggal 14 Februari 2024 untuk memilihnya.

Dia juga tidak mau melakukan aksi kecurangan dengan memberikan uang untuk membeli suara penduduk Muba.

“Saya datang memberikan cinderamata saja kalau memberikan uang tidak karena saya sudah memberikan bukti keseriusan untuk membangun Muba kepada mereka dengan obrolan kami. Tetapi selain janji membangun Muba saya juga akan memberangkatkan penduduk

Muba pergi haji atau umroh akan kita undi beberapa waktu tertentu. Nah itulah janji saya kalau berharap memberi uang atau harus melakukan politik uang saya katanya kepada mereka mending tidak usah memilih saya,” katanya saat menyampaikan pesan kepada penduduk Muba yang ditemui di Dapilnya.

Dia pun memiliki cita-cita tidak hanya ingin m e m a - j u k a n

Kabupaten Muba agar lebih dikenal lagi dengan kemajuan infrastruktur seperti jalan perhotelan dan pariwisata saja.

Dia berkata siapapun Gubernur Sumsel kedepannya selama dia terpilih menjadi calon legislatif wakil Muba dia mau membuat penduduk Sumsel bahagia.

“Saya tahu semua masyarakat Sumsel ingin Sriwijaya FC kembali bangkit dan berlaga kembali di Liga 1. Nah ini janji saya kepada masyarakat Sumsel apabila saya terpilih siapapun Gubernur Sumsel saya akan bantu mengurus lagi Sriwijaya FC agar semua penduduk bahagia. Karena saya tahu semua masyarakat Sumsel inginkan itu kan,” pungkasnya

Sementara itu sebagai kader PPP menilai Pilpres yang tengah berlangsung sangat luar biasa dan menarik perhatian semua lapisan masyarakat Indonesia. Bahkan debat Pilpres 2024 digelar oleh masyarakat luas bahkan Gen Z merespon seperti nonton Piala Dunia dengan membuat event nonton bareng atau Nobar debat di setiap wilayah di Indonesia.

Dia melihat Gen Z mulai ikut terlibat terlebih lagi mereka memiliki hak suara di Pilpres 2024 cukup besar untuk menentukan calon pemimpin Tanah Air.

Menurutnya eforia untuk mencapai Indonesia lebih baik lagi kedepannya sudah mulai dirasakan kegembiraan diikuti oleh kaum Gen Z.

“Kalau untuk Pilpres 2024 saya rasa sangat meriah Gen Z pun menggelar nobar. Saya rasa kegembiraan demokrasi terasa merata bukan hanya dirasakan kaum bapak-bapak saja sekarang kaum Gen Z ikut tampil dan mereka juga ada jagoannya masing-masing,” tuturnya.

Menurutnya PPP mendukung pasangan Ganjar dan Mahfud MD merupakan pemimpin yang dipersiapkan jauh-jauh hari. Bagi PPP keduanya sosok pemimpin yang bukan kaleng-kaleng diibaratkan seperti sekolah Ganjar dan Mahfud MD telah melewati masa SD SMP dan SMA.

“Salah satu opsi yang baik itu pasangan Ganjar dan Mahfud MD. Terlebih lagi Indonesia sangat lemah soal hukumnya dipimpin orang yang mengerti hukum seperti Mahfud MD dan yang mengerti memimpin seperti Ganjar Pranowo Indonesia akan lebih baik lagi kedepannya,” jelasnya.

Diakuiinya untuk Gen Z pastinya bisa melihat semua itu tanpa menilai sosok pemimpin dari segi umur. Kendati salah satu Cawapres memiliki umur jauh lebih muda dari kontestan lainnya yakni Gibran Rakabuming Raka Wali kota Surakarta ikut berkompetisi nomor urut 02.

“Menarik Gen Z itu tidak harus dari Cawapres yang muda umurnya. Karena kalau dari sisi umur menjadi pemimpin seharusnya lebih matang untuk memimpin Indonesia dengan penduduk yang sangat padat. Jadi jangan dipaksa kalau tidak pantas kasihan rakyatnya jadi korban, memimpin Indonesia harus berpengalaman. Seperti pilot harus mencari yang berpengalaman untuk terbang kalau tidak bahaya,” pungkasnya.●RDR



“Pengemudi ojek online selama ini tidak ada yang memperhatikan nasib mereka. Keluh kesah, kesulitan dalam menjalani profesi serta kesejahteraan yang masih di bawah rata-rata membuat mereka ingin mengadu namun tidak tahu dengan siapa”

Muhammad Asrul Indrawan



MEWAKILI SUARA DAN PERASAAN OJEK ONLINE

Para peserta Pemilu 2024 khususnya untuk pemilihan legislatif (Pileg) berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari petani hingga pengusaha. Ada juga mantan pensiunan pejabat dan pekerja informal lainnya.

Sehingga jangan heran bila diantara mereka ada juga seorang pengemudi ojek online, penjual sayur keliling dan lainnya.

Salah satunya adalah Muhammad Asrul Indrawan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Sumatera Selatan. Bagi pelaku ojek online nama Asrul cukup dikenal khususnya di Kota Palembang.

Hal ini juga yang dimanfaatkan Asrul untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mewakili ojek online.

Selama ini belum ada sosok yang memahami dan mengerti perasaan serta nasib para ojek online. Sehingga kehadiran Asrul Indrawan diharapkan bisa menjadi wakil mereka di parlemen nanti.

“Pengemudi ojek online selama ini tidak ada yang memperhatikan nasib mereka. Keluh kesah, kesulitan dalam menjalani profesi serta kesejahteraan yang masih di bawah rata-rata membuat mereka ingin mengadu namun tidak tahu dengan siapa. Harapan saya dengan jadi wakil mereka di parlemen Insha Allah bisa lebih memperhatikan lagi,” ujar Asrul Indrawan yang juga berprofesi sebagai pengusaha ini.

Dia mengungkapkan, untuk Kota Palembang sendiri pengemudi ojek online yang tergabung di ADO berjumlah 12 ribu orang. Dari jumlah tersebut hampir 90 persen belum mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) sementara penghasilan mereka saat ini di bawah rata-rata.

“Sebetulnya ada yang mencoba mengurus sendiri agar bisa dapat BLT tapi selalu gagal. Harapan saya dengan menjadi anggota legislatif di DPR RI bisa membantu nasib rekan-rekan Ojol ini,” ujar ayah lima orang anak ini.

Nasib Ojol akan selalu sulit akibat murahnya tarif yang mereka terima. Di sisi lain mereka juga harus berjibaku mendapatkan penumpang. Sehingga meski sebagai mitra dari aplikasi namun nasib mereka tidak sebaik aplikasi.

“ADO adalah organisasi profesi namun pekerjaan ini bukan menjanjikan sehingga banyak diantara mereka ingin nantinya tidak mengojek lagi karena sulit. Alhamdulillah sejak saya menjadi Ketua ADO, rekan-rekan semua bisa kompak,” ujar

Asrul.

Sebagai Ketua ADO Sumsel, Asrul selalu merangkul anggotanya termasuk bila ada bantuan pemerintah. Dulu, bantuan dari pemerintah selalu ke aplikasi namun sekarang sudah dikelola ADO sendiri.

“Makanya saya banyak dibantu rekan-rekan ojek online untuk membantu pencatatan saya,” ucapnya.

Selain dekat dengan para pengemudi ojek online, Muhammad Asrul Indrawan juga dikenal luas masyarakat kalangan olahraga. Bahkan dia menjabat sebagai ketua harian Wushu Sumatera Selatan.

Di Pileg 2024 ini, Asrul menjadi Caleg dari PPP dengan nomor 04 dari Dapil 1 yang meliputi wilayah Kota Palembang, Kabupaten Banyuwangi, Muba, Lubuklinggau,

Musi Rawas dan Kabupaten Muratara.

Asrul juga merupakan Ketua Gerakan Pemuda Ka'bah Sumsel yang merupakan sayap PPP.

Sebagai kader partai, Asrul memandang Pilpres 2024 ini merupakan pesta demokrasi yang cukup baik. Tinggal masyarakat yang memilih siapa diantara tiga calon itu menjadi pilihan rakyat.

Pilihan itu bisa dilihat dari hasil debat Capres dan Cawapres. Dimana masyarakat bisa melihat kualitas calon pemimpin mereka nanti.

Sebagai kader, dirinya semakin yakin dengan

gan sosok pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan nomor urut 03 ini memiliki segudang pengalaman di dunia pemerintahan, legislatif dan yudikatif.

Sosok Ganjar adalah orang yang berangkat dari seorang legislator karena beberapa kali menjadi anggota DPR dan terakhir menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Sedangkan sosok Mahfud MD juga selain seorang Santri, dia juga pernah menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi serta berpengalaman menteri baik di masa pemerintahan Gus Dur hingga Joko Widodo. Hal itu menunjukkan mumpuni dan saling melengkapi.

“Saya yakin betul sosok Mahfud MD mampu mendampingi Ganjar dari segala sisi, baik dari aspek hukum, birokrasi dan lain sebagainya. Bahkan pasangan ini kompak dan tidak membuat seolah-olah sosok Wapres ini sebagai ban serep saja,” ujar Asrul.

Bahkan dalam debat sosok Mahfud banyak memberikan ilmu dan aspek kerja dengan keilmuan.

“Artinya dalam hal memimpin dalam hal fisik dan pikiran pasangan calon nomor urut tiga ini cukup mumpuni untuk memimpin negara ini,” tegas Asrul.

Bahkan Asrul berkeyakinan bahwa pasangan Ganjar-Mahfud mampu meraih suara sebesar 50 persen dan menjadikan Sumsel sebagai lumbung suara pada pemilu yang tidak lama lagi akan digelar secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

“Untuk itu semua kami serahkan kepada masyarakat, biarkan masyarakat yang menilai sosok pasangan mana yang mumpuni untuk memimpin Indonesia ke depan. Yang pasti pasangan calon 03 secara pikiran dan fisik siap memimpin Indonesia ke depan,” terangnya.

Sementara dari sisi milenial, sosok Ganjar - Mahfud cukup dekat dengan anak muda. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya aktivitas mereka yang melibatkan anak muda, mahasiswa serta kalangan kampus.

Selain itu visi dan misi mereka juga jelas, salah satunya dengan menyiapkan 17 lapangan kerja. Kemudian menyiapkan fasilitas kesehatan untuk satu desa satu Puskesmas di seluruh Indonesia.

“Semua serapan visi misi ini juga berasal dari para anak muda. Sehingga bahkan bisa dikatakan lebih milenial dari calon wakil presiden yang lebih mudah,” urai dia.

Sehingga Asrul yakin selain bisa mengangkat derajat para ojek online pencalonannya sebagai anggota DPR RI bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Selatan. Apalagi bila Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terpilih sebagai pasangan presiden dan wakil presiden maka dipastikan Indonesia akan maju pesat lagi. •RDR





“NasDem sudah menyusun 14 provinsi Pak Surya Paloh turun di Kampanye Akbar”

Hermawi Taslim

INFO
PARTAI

Minggu IV • Januari 2024

13

SURYA PALOH IKUT TURUN GUNUNG

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh akan turun langsung untuk memimpin kampanye akbar di beberapa kota di Indonesia. Bahkan, dirinya akan berkampanye akbar bersama calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan, di empat provinsi.

Saat memimpin Apel Digital Kickoff Kampanye Terbuka Partai NasDem pada Pemilu Serentak 2024, Minggu, 21 Januari 2024, Surya Paloh meminta para pengurus dan kader Partai NasDem untuk bekerja semaksimal mungkin memenangkan partai.

Dalam pengarahannya kepada lebih dari 20 ribu pengurus Partai NasDem tingkat pusat hingga daerah, serta para calon legislatif, Surya Paloh menyebutkan, Pemilu 2024 merupakan momentum untuk menentukan eksistensi dan peran partai. NasDem optimistis bisa meraih 100 kursi di Parlemen atau paling tidak bisa bertengger di posisi tiga besar.

“Paling tidak saya tekankan kepada saudara-saudara semuanya, NasDem mempunyai obsesi, NasDem mempunyai tekad, NasDem mempunyai keyakinan dan NasDem mempunyai

harapan. Insya Allah kita masuk paling tidak di tiga besar,” ucap Surya Paloh.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, menyebut pihaknya menyesuaikan diri dengan pembagian zonasi kampanye yang akan dibagikan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hermawi menjelaskan bahwa kampanye akbar untuk Pileg NasDem akan langsung dipimpin oleh Surya Paloh. Namun, dia belum merinci daerah mana saja yang akan disambangi langsung oleh Paloh.

“NasDem sudah menyusun 14 provinsi Pak Surya Paloh turun di Kampanye Akbar,” ujar Hermawi saat Konsolidasi Nasional Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri untuk Perubahan dan Persatuan (FKP3) dalam Memenangkan Paslon AMIN 2024 di Jakarta, Kamis, 18 Januari 2024.

Hermawi lantas menyinggung persinggungan jadwal kampanye Paloh dan Anies di sejumlah provinsi. Menurut dia, NasDem menargetkan kampanye Anies bersama Paloh ada di delapan provinsi. Namun yang baru ditetapkan baru empat provinsi.

“Kalau yang bertautan dengan kami, artinya kampanye Anies dan kampanye Pak Surya Paloh itu sekarang ini baru 4 pertautannya. Sulawesi Utara, Jawa Barat, DKI, apa satu lagi,” kata Hermawi.

“Target kita delapan. Jadi misalnya di Sulawesi Utara, di Sulawesi Utara itu tanggal 5, pagi-pagi Pak Anies ke Kotamobagu. Dari Kotamobagu, dia balik ke Manado bersama-sama Pak Surya,

kampanye. Selesai dari Manado, Pak Anies ke Semarang bersama Pak Muhaemin. Kira-kira begitu ya,” imbuh dia.

Dalam agenda kampanye akbar yang dimulai 21 Januari hingga 10 Februari 2024, Surya Paloh dijadwalkan akan mengawalinya dari Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin, 22 Januari 2024. Kepastian kedatangan Surya Paloh dibenarkan oleh Ketua DPW Partai NasDem NTB, Rumaksi.

Mantan Wakil Bupati Lombok Timur itu menyatakan pihaknya sudah mempersiapkan semua hal terkait kegiatan kampanye nasional yang dihadiri Surya Paloh itu.

“Semua persiapan telah selesai intinya kami dari DPW Partai NasDem NTB ingin kampanye nasional ini berjalan lancar tanpa ada halangan,” katanya, Sabtu, 20 Januari 2024.

Pihaknya mengaku gembira dengan kedatangan Surya Paloh. Pasalnya, saat ini sudah memasuki momen-momen krusial Pemilu 2024. Kampanye nasional ini, menurutnya, dapat mempererat rasa kekeluargaan semua kader NasDem di tiap tingkatan untuk menjemput kemenangan di NTB.

Ia menjelaskan Surya Paloh akan menjalani sejumlah agenda yang mayoritas terpusat di Lombok Timur. Diakuinya, Lombok Timur merupakan kabupaten dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar di NTB.

Surya Paloh dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok pada 20 Januari 2024 pukul 10.00 WITA. Surya Paloh kemudian akan bertolak ke Sentra Tenun di Desa Pringgasele, Lombok Timur. Setelah itu, ia

akan bertolak ke kediaman pribadi Ketua DPW NasDem NTB Rumaksi. Di sana, Surya Paloh akan santap siang sekaligus bersilaturahmi dengan tokoh agama di Lombok Timur.

Setelahnya, barulah Surya Paloh akan menghadiri kampanye akbar bersama kader dan simpatisan Partai NasDem se-NTB di Lapangan Masbagik, Lombok Timur.

“Semangat kami adalah kerja keras dan kerja bersama untuk kemenangan Partai NasDem di pemilu nanti. Dari itu nanti di Lapangan Gotong Royong Masbagik, kita akan konsolidasi akbar dari tingkat pengurus ranting sampai ke DPP. Artinya kampanye nasional ini sangat berarti bagi kami selaku Ketua DPW NasDem NTB,” tegasnya.

Pada Pileg 2019, Partai NasDem finis di urutan kesembilan dengan total 161.405 suara. NasDem NTB juga menempatkan satu kadernya di DPR RI dan 6 kader di DPRD NTB.

Lolos Senayan

Di sisi lain, Charta Politika Indonesia mempublikasi survei terkait elektabilitas partai politik, di mana tingkat keterpilihan Partai NasDem mencapai hampir sembilan persen.

“Ada NasDem yang elektabilitasnya 8,8 persen,” kata peneliti Charta Politika Indonesia, Nachrudin, dalam rilis survei secara daring, Minggu, 21 Januari 2024.

Nachrudin memerinci elektabilitas tertinggi diraih PDIP dengan 22,6 persen. Kemudian Partai Gerindra 18,8 persen dan Partai Golkar 9,3 persen.

“Keempat partai ini merupakan partai politik tertinggi pilihan responden,” papar dia.

Nachrudin menyebut elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) delapan persen. Berikutnya disusul Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 6,8 persen dan Partai Amanat Nasional (PAN) empat persen. Sementara itu, elektabilitas partai politik lainnya di bawah empat persen. Artinya, mereka tidak memenuhi ambang batas parlemen.

“Misalnya Demokrat 3,9 persen, PPP (Partai Persatuan Pembangunan) 3,6 persen dan Perindo 2,8 persen,” jelas Nachrudin.

Survei Charta Politika Indonesia dilakukan pada 4-11 Januari 2024. Responden survei 1.220 orang yang telah memiliki hak pilih atau berusia di atas 17 tahun. Penarikan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan wawancara tatap muka. Toleransi kesalahan survei sekitar 2,82 persen. RDO





GOLKAR AMANKAN KEMENANGAN DI JABAR

Partai Golkar optimis bisa berjaya di Jawa Barat berdasarkan sejumlah faktor pendukung dan melihat realitas di lapangan di Tanah Pasundan.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyatakan, partai beringin di bawah kepemimpinan Ketua DPD I Ace Hasan Syadzily mampu melesat di nomor dua partai terbesar di seluruh Jabar. Selain itu, masuknya mantan gubernur Jabar Ridwan Kamil ke partai berlambang pohon beringin juga bisa menjadi pendorong kemenangan di Jawa Barat.

“Kang Ace (Ace Hasan Syadzily) baru dilantik tahun 2022. Saat dilantik Golkar nomor 4. Per hari ini ranking Golkar nomor 2, dan jaraknya tipis-tipis with margin of error. Sekarang sudah ada Pak Ridwan Kamil. Kalau sudah ada Pak Ridwan Kamil, maka there is no margin and no error. Dan Golkar nomor satu,” tutur Airlangga saat Konsolidasi dan Pembekalan Saksi se-Wilayah Priangan Provinsi Jabar di Bandung, Jumat, 19 Januari 2024.

Airlangga menegaskan, untuk mencapai kemenangan di Pemilu 2024, Golkar harus memiliki saksi yang militan dan kuat. Menurutnya, kemenangan Pemilu 2024 bukan berada di angka-angka survei yang dirilis sejumlah lembaga. Airlangga ingin memastikan kemenangan partai bernomor 4 di pemilu 2024 terwujud di seluruh tempat pemungutan suara (TPS).

“Kita ingin para saksi militan dan kuat. Kemenangan kita di pemilu ada di TPS, bukan di survei. Kalau TPS tidak ada saksi-sanya bisa hilang kemenangan,” tegas Airlangga.

Airlangga menyebut partainya menargetkan bisa mengamankan 14 kursi DPR RI dan 26 kursi DPRD Jabar. Ia juga optimis target itu bisa tercapai dengan masuknya Ridwan Kamil sebagai daya pendorong kemenangan.

Selain kemenangan Pileg 2024, Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini mengingatkan

pada seluruh kader Golkar di Jabar untuk memenangkan paslon nomor urut 2 di Pilpres 2024. Menurut Airlangga, masuknya Ridwan Kamil dalam barisan tim kampanye daerah Prabowo-Gibran menjadi penguat peluang kemenangan.

“Pak Ridwan Kamil juga tim kampanye daerah untuk Prabowo-Gibran. Jadi Golkar dan Pak Prabowo satu target. Menang Pak Prabowo, menang Partai Golkar,” tegas Airlangga.

Sementara, Ketua DPD I Partai Golkar Jabar, Ace Hasan Syadzily, mengaku tegak lurus dengan perintah dan target kemenangan yang diminta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Bahkan, Ace sempat sesumbar masuknya Ridwan Kamil ke Golkar bisa membuat partai beringin melebihi target menyumbangkan kursi ke DPRD Provinsi.

“(Tahun) 2024 target pesimis kita 26 kursi. Ini saat Rakerda, tapi setelah Kang Emil (Ridwan Kamil) bergabung, kita bisa mendapatkan 30 kursi,” ujar Ace Hasan.

Ace menambahkan siap memenuhi target 292 kursi untuk DPRD kabupaten dan kota di seluruh wilayah Jabar. Saat ini, jumlah kursi Golkar di DPRD Kabupaten dan kota di Jabar sebanyak 194. Ace juga optimis mampu menyumbangkan kemenangan satu putaran untuk paslon Prabowo-Gibran.

“Target TKD 60 persen, maka mudah-mudahan dengan sisa 25 hari lagi,

Prabowo-Gibran 60 persen di Jawa Barat,” tegasnya.

Keliling Bali Nusa Tenggara

Airlangga juga melanjutkan kampanye partainya sekaligus Prabowo-Gibran dengan keliling di Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Barat (NTT) beberapa waktu lalu.

Titik pertama yang dikunjungi adalah Kabupaten Badung, Bali. Di lokasi, Airlangga disambut ribuan masyarakat, simpatisan, dan kader partai beringin dalam konsolidasi kemenangan Partai Golkar dan Prabowo-Gibran untuk Pemilu 2024. Dia meminta agar seluruh pimpinan Golkar Bali, kader, dan juga simpatisan untuk bergerak lebih aktif dan militan turun ke masyarakat.

“Kobarkan semangat dan perkuat soliditas dalam memenangkan Partai Golkar dan juga calon presiden dan calon wakil presiden kita B a p a k

Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Pemilu semakin dekat, tekad kita adalah Indonesia maju, Golkar menang, Prabowo Presiden, rakyat Sejahtera,” kata Airlangga.

Titik kampanye selanjutnya yang dituju rombongan Airlangga beserta jajaran DPP Partai Golkar adalah Alun-Alun Tastura, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Di Lombok, Airlangga menghadiri kegiatan Senam Gemoy sekaligus perayaan HUT ke-59 Partai Golkar.

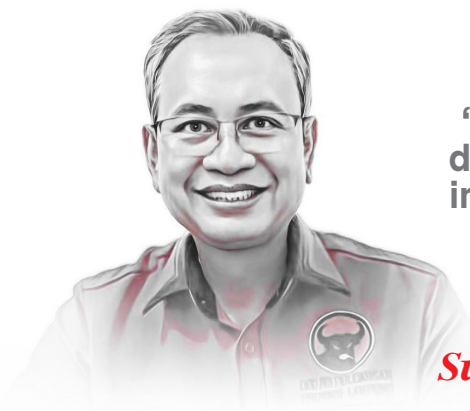
Hal itu menunjukkan komitmen Partai Golkar solid bersama Airlangga, Jokowi dan Prabowo-Gibran. Airlangga senang lantaran antusiasme masyarakat Lombok begitu luar biasa dan penuh kegembiraan.

“Tentunya Partai Golkar akan terus membawa semangat kegembiraan dalam menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024. Saya mengajak masyarakat untuk menjaga dan mengawal pemilu kita agar terselenggara dengan damai, aman, tertib dan senantiasa guyub,” ujar Airlangga.

Titik terakhir yang dikunjungi Airlangga dalam konsolidasi Partai Golkar dan Prabowo-Gibran di Labuan Bajo, NTT. Di sana, Airlangga menghadiri perayaan Natal dan tahun baru bersama keluarga besar DPW Partai Golkar NTT. Dalam acara yang hikmat tersebut, Airlangga berpesan agar jajaran pimpinan DPW Partai Golkar NTT, kader dan seluruh simpatisan untuk senantiasa guyub dalam perbedaan dan selalu memberikan pengabdian terbaik untuk rakyat.

“Kami bersyukur karena perayaan Natal dan tahun baru terlaksana dengan suasana penuh toleransi dan keberagaman. Kesempatan baik ini tentunya telah memberikan inspirasi, semangat dan kekuatan kepada jajaran pimpinan, kader dan seluruh simpatisan Partai Golkar untuk senantiasa guyub dalam perbedaan,” ucap Airlangga. ● RDO





“Kita sudah mengenal kader-kader terbaik kita saat ini, termasuk Umar Ahmad dan masih banyak kader lainnya yang berpotensi”

Sutono

INFO PILKADA

Minggu IV • Januari 2024

15

PEMBANGUNAN LAMPUNG JADI PRIORITAS

Umar Ahmad diakui sebagai salah satu kader PDIP yang terkemuka di Lampung. Namun, keterlibatannya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) atau Pilkada 2024 di Lampung masih menjadi isu yang perlu dicermati.

Meskipun demikian, Sekretaris DPD PDIP Lampung, Sutono, mengungkapkan bahwa belum ada pembahasan resmi terkait Pilkada, karena fokus mereka saat ini adalah menghadapi Pilpres dan Pileg 2024.

“PDIP dari awal hingga sekarang masih berfokus pada Pilpres dan Pileg,” ujar Sutono, beberapa waktu lalu.

Dijelaskan Sutono, rencana Pilkada akan dibahas setelah Pilpres dan Pileg.

“Rencana untuk Pilkada akan dibahas setelah 14 Februari 2024 (Pilpres dan Pileg),” tambahnya.

Sutono menegaskan bahwa pihaknya akan mengevaluasi hasil Pemilu 2024 setelah melihat persentase perolehan suara.

“Setelah melihat hasil berapa persen, barulah kita bisa membahas terkait Pilkada. Saat ini, di PDIP belum ada pembahasan mengenai hal tersebut,” jelasnya.

Sutono menjelaskan bahwa elektabilitas partai dan kader-kadernya akan dipengaruhi secara otomatis jika partai berhasil meraih 35 persen suara dalam Pemilu nanti. Dalam konteks ini, jika partai meraih persentase tersebut, PDIP akan segera mengambil langkah untuk mendukung calon yang dianggap layak, termasuk Umar Ahmad.

Ditanya mengenai bocoran bakal calon gubernur Lampung dari PDIP, Sutono menyebut Umar Ahmad sebagai salah satu kader terbaik.

Menurutnya, mantan Bupati Tulangbawang Barat tersebut memiliki potensi untuk maju dalam Pilkada 2024.

“Kita sudah mengenal kader-kader terbaik kita saat ini, termasuk Umar Ahmad dan masih banyak kader lainnya yang berpotensi,” pungkasnya.

Penunjukan Umar Ahmad sebagai Wakil Ketua DPD PDIP Lampung dalam Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) dianggap sebagai ujian atau tes dari PDIP untuk potensi calonannya dalam Pilgub 2024 yang akan datang.

Mengenai hal tersebut, Umar Ahmad, menyatakan bahwa belum ada pembicaraan terkait pencalonan kepala daerah. Dia menegaskan bahwa keputusan mengenai calon Gubernur merupakan kewenangan dari DPP PDIP.

“Masih terlalu awal untuk membahas hal tersebut,” ujar Umar.

Ketika ditanya mengenai kesiapannya untuk maju dalam Pilgub, Umar menyatakan kesiapannya jika memang partai mengugaskannya.

“Tentu saja, saya siap. Bahkan sebagai Ketua Bappilu pun saya sudah siap,” ungkapnya.

Umar Ahmad menekankan bahwa pembangunan Lampung ke depan harus memperhatikan prinsip-prinsip budaya agar daerah ini dapat berkembang lebih baik.

Ia mengajak untuk tidak hanya melihat Lampung sebagai sekadar wilayah geografis, melainkan sebagai entitas yang telah lama memiliki visi bersama.

“Pembangunan di Lampung harus didasarkan pada prinsip-prinsip budaya yang telah lama menjadi ciri khas daerah ini. Visi yang telah kita sepakati harus menjadi landasan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, dengan memperhatikan piil pesenggiri, nemui nyimah, nenggah-ngapur, bejuluk adat, dan sakai sembayon,” ujar Umar Ahmad.

“Sejak zaman Lampung belum berdiri sebagai daerah otonom, kita telah menyatukan berbagai kelompok di wilayah ini menjadi satu, dengan tujuan memiliki visi bersama yang menjadi dasar pembangunan Lampung,” ulasnya.

Menurut Umar Ahmad, penting bagi masyarakat Lampung untuk terus mengembangkan pikiran dan gagasan, karena segala sesuatu yang muncul saat ini berasal dari ide dan konsep yang lahir dari pemikiran tersebut.

Namun, sebelumnya muncul wacana kemungkinan Umar Ahmad berpasangan dengan Sutono pada Pilgub Lampung 2024.

Akademisi dari Universitas Lampung, Darmawan Purba SIP MIP mengungkapkan wacana ini dapat menjadi alternatif yang baik untuk memajukan Provinsi Lampung ke depan.

“Umar Ahmad-Sutono dapat menjadi pasangan alternatif yang baik, mengingat Umar Ahmad sebagai tokoh muda yang banyak didukung oleh berbagai pihak,” ungkap Darmawan Purba.

Sutono, yang merupakan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, dianggap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pasangan ini.

Darmawan Purba meyakini bahwa Umar Ahmad, dengan dukungan dari partai pemenang pemilu, dapat mengakselerasi pembangunan di Provinsi Lampung.

“Umar Ahmad, sebagai bagian dari keluarga besar PDIP dan dengan kinerja yang telah teruji, bersama Sutono,

memberikan alternatif kandidat yang membawa perubahan positif bagi Provinsi Lampung,” tambahnya.

PDIP dianggap sebagai kendaraan politik yang potensial untuk membantu Umar Ahmad dan Sutono meraih kemenangan pada Pilgub Lampung 2024.

Darmawan Purba menyatakan bahwa PDIP, sebagai partai pemenang dalam dua pemilu terakhir, memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat.

“Secara elektoral, PDIP telah meraih dukungan masyarakat dalam pemilu, sehingga tanggung jawabnya adalah melayani masyarakat,” paparnya.

Menanggapi hal ini, Darmawan menyoroti bahwa PDIP di Lampung belum berhasil memenangkan kader-kadernya pada Pilgub Lampung dalam dua periode sebelumnya.

Saat ini, mayoritas masyarakat melihat PDIP berpotensi memenangkan Pemilu 2024 untuk ketiga kalinya dengan mengusung calon presiden Ganjar Pranowo yang memiliki elektabilitas tinggi.

“Wacana Umar Ahmad dan Sutono akan menjadi modal besar bagi tokoh-tokoh politik lokal di Lampung, terutama kader PDIP,” kata Darmawan.

Umar Ahmad, berpasangan dengan Sutono, dianggap sebagai pasangan ideal untuk Pilgub Lampung 2024.

“Meskipun tidak ada rumusan representasi, kombinasi dua tokoh politik dan birokrat ini

merepresentasikan dua etnis terbesar di Lampung, yaitu Jawa-Lampung, yang umumnya dipasangkan dalam setiap pilkada di Lampung,” jelas Darmawan.

Umar Ahmad, seorang politisi berpengalaman dalam kepemimpinan daerah, dinilai sukses membawa perubahan di Kabupaten Tulangbawang Barat. Pengalaman ini dianggap sebagai modal sosial yang dapat membantu perubahan di tingkat Provinsi Lampung.

Sementara itu, Sutono, yang memiliki latar belakang sebagai mantan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris PDIP Lampung, dianggap memiliki pemahaman yang baik tentang birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

“Dengan perpaduan modal sosial dan dukungan politik, PDIP Lampung dapat efektif mengusung Umar Ahmad-Sutono di Pilgub Lampung 2024,” kata Darmawan.

Namun, ketika dikonfirmasi mengenai wacana tersebut, Sekretaris DPD PDIP Lampung, Sutono, tidak memberikan tanggapan.●IRY





IJECK ATAU BOBBY NASUTION UNTUK SUMUT

Dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara 2024, Partai Golkar telah menunjuk Wali Kota Medan, Bobby Nasution dan Ketua DPD I Golkar Sumatera Utara (Sumut), Musa Rajekshah alias Ijeck, sebagai bakal Calon Gubernur (Cagub) Sumut.

Surat tugas yang diberikan kepada keduanya disampaikan melalui surat resmi dari DPP Partai Golkar dengan nomor Sund-308/GOLKAR/XI/2023. Surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan Sekretaris DPP Golkar, Lodewijk F Paulus.

Mengenai pilihan antara Ijeck dan Bobby, Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto enggan memberikan jawaban konkret. Menurut Menko Perekonomian tersebut, fokus Partai Golkar saat ini masih pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

“Jadi kita Pileg Pilpres dulu, Pak Ijeck juga akan maju di Pileg,” ujar Airlangga Hartarto setelah Rapat Pimpinan Daerah III Golkar Sumut, belum lama ini.

Saat ditanya mengenai kriteria atau metode penentuan dukungan terhadap Ijeck atau Bobby, Airlangga Hartarto tetap menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah Pileg dan Pilpres.

“Pileg Pilpres dulu,” tambahny.

Sebelumnya, surat resmi dari DPP Partai Golkar telah mengindikasikan dukungan terhadap Bobby dan Ijeck sebagai calon Gubernur Sumut. Dalam surat tersebut, terdapat undangan untuk menghadiri pengarahan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar kepada Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Partai Golkar.

Lampiran kedua surat tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa Bobby Nasution dan Ijeck adalah dua nama yang akan diusung sebagai Calon Gubernur Sumut.

Sekretaris Golkar

Sumut, Datuk Ilhamsyah mengonfirmasi penunjukan kedua nama tersebut.

“Betul (Golkar usulkan Bobby dan Ijeck jadi Cagub Sumut), di Medan Bobby dapat juga,” ujar Ilhamsyah

Ijeck sendiri adalah Mantan Wakil Gubernur Sumut periode 2018-2023 dan saat ini memimpin Partai Golkar Sumut sejak tahun 2020. Ia dianggap kuat sebagai calon Gubernur Sumut berkat pengalamannya dan dukungan yang besar di Sumut.

Ilhamsyah menyatakan dukungan yang solid dari pihaknya terhadap mantan Wakil Gubernur Sumut ini. Ia menambahkan bahwa Ijeck telah aktif dalam konsolidasi politik, berinteraksi dengan masyarakat, dan merancang program-program yang bermanfaat bagi masyarakat Sumut.

“Kita terus membuat program yang bermanfaat untuk masyarakat bukan hanya karena saat kepentingan politik saja. Golkar tetap harus hadir kapan pun untuk masyarakat,” ujar Ilhamsyah.

Dengan arahan dari Ijeck, mereka berkomitmen untuk terus mengembangkan program-program pro-masyarakat di sepanjang perjalanan politik mereka.

Nama Ijeck itu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Sumut, Ijeck lahir dari kalangan keluarga yang cukup berada, sang ayah H. Mussanif merupakan seorang pengusaha dan pemilik

Group Anugerah Langkat Makmur (ALAM) yang bergerak di bidang pabrik kelapa sawit, properti, pupuk kompos, sarang burung walet, hingga SPBU.

Tak hanya berkecimpung di dunia politik, Ijeck juga menjabat beberapa organisasi dengan rentang waktu yang cukup lama.

Musa Rajekshah lahir di Medan, Sumatera Utara pada 1 April 1974. Ia merupakan anak kedelapan dari sembilan bersaudara pasangan H. Musannif dan Hj. Syarifah Rahmah.

Ijeck telah mengenyam pendidikan hingga S2 di Universitas Sumatra Utara (USU) pada tahun 2007 sampai 2009. Aktivitas non pendidikan Ijeck adalah seorang pengusaha sukses yang cukup terkenal di Medan.

Beberapa bidang usaha yang Ijeck geluti mulai dari perkebunan kelapa sawit hingga dunia otomotif. Selain itu, Musa Rajekshah juga cukup berprestasi di kancah olahraga dan kerap terlibat dalam aktivitas sosial.

Sebelum terjun ke dunia politik, Ijeck pernah menduduki posisi penting di beberapa perusahaan ternama, mulai dari PT Anugerah Sawindo, PT Kembang Sepatu Alam Abadi, dan PT Sumatra Motor Indonesia.

Meski Ijeck tidak pernah sekalipun terlibat langsung di dalam berbagai aktivitas

politik, namun ia tetap bersikeras untuk bisa terjun di dunia politik.

Sampai pada tahun 2018, namanya terpampang menjadi calon Wagub Sumut mendampingi Edy Rahmayadi.

Tak disangka, ia bersama Edy Rahmayadi telah memikat hati para warga Sumut itu berhasil memenangkan suara di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut.

Sementara, nama Bobby Nasution yang menjabat sebagai Wali Kota Medan juga diusung Partai Golkar untuk Pilgub Sumut 2024 memiliki perjalanan politik yang cukup panjang.

Bobby Nasution mulai menarik perhatian publik setelah menikahi putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu, pada tahun 2017.

Meskipun memiliki latar belakang sebagai pengusaha sebelum terjun ke dunia politik, Bobby memutuskan untuk mengikuti jejak mertuanya, Jokowi, dan terlibat dalam Pilkada Kota Medan tahun 2020.

Pada awal Desember 2019, Bobby secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Medan dengan dukungan dari PDIP.

Bobby menegaskan bahwa keputusannya terjun ke dunia politik tidak melibatkan campur tangan atau intervensi dari Jokowi. Selain menjadi kader PDIP, ia juga sempat mendaftarkan diri melalui Partai Golkar, tetapi lebih memilih berada di bawah panji PDIP.

Pada Maret 2020, Bobby secara resmi menjadi kader PDIP setelah mengajukan diri dan mengisi formulir pendaftaran di Kantor DPD PDIP Sumut di Medan. Keputusan ini mengikuti langkah kakak iparnya, Gibran Rakabuming Raka, yang maju dalam Pilkada Kota Solo.

PDIP secara resmi mengusung Bobby sebagai calon Wali Kota Medan bersama Aulia Rahman pada Agustus 2020. Pasangan ini diusung oleh PDIP, PAN, Golkar, PSI, Gerindra, Nasdem, Hanura, dan PPP, dengan koalisi partai pengusung memiliki 39 kursi di DPRD Kota Medan.

Dengan dukungan koalisi, Bobby berhasil memenangkan Pilkada Medan 2020, mengalahkan pasangan petahana, Akhyar Nasution-Salman Alfarisi.

Setelah sukses dengan PDIP dan memenangkan Pilkada Medan 2020, Bobby kemudian dikabarkan berpaling dari PDIP. Dalam Pilpres 2024, ia mendukung pasangan Prabowo-Gibran, kakak iparnya. • IRY





“Lawannya siapa? Ya, tergantung PKB dan PDIP. Kalau PKB dan PDIP memutuskan mendukung Khofifah, oposisi di Pilgub Jatim 2024 mungkin akan menjadi lapangan kosong”

Baihaki Sirajt

INFO PILKADA

Minggu IV • Januari 2024

17

PENANTANG KHOFIFAH TERGANTUNG PKB DAN PDIP

Khofifah Indar Parawansa mulus melaju menuju Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2024. Ia mendapat dukungan untuk maju sebagai calon gubernur dari empat partai politik, yakni PAN, Gerindra, Demokrat dan Golkar.

Partai lain, antara lain PKB dan PDIP juga mengisyaratkan bakal mendukung Khofifah pada Pilgub Jatim tahun depan.

Lantas, siapa saja yang berpotensi menjadi lawan Khofifah di Pilgub Jatim 2024?

Pengamat politik sekaligus Direktur Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Baihaki Sirajt menyebut potensi lawan Khofifah bergantung pada sikap PKB dan PDIP di Pilgub Jatim 2024.

“Lawannya siapa? Ya, tergantung PKB dan PDIP. Kalau PKB dan PDIP memutuskan mendukung Khofifah, oposisi di Pilgub Jatim 2024 mungkin akan menjadi lapangan kosong,” kata Baihaki.

Meski lawan Khofifah di Pilgub Jatim belum jelas, Baihaki mencatat beberapa nama yang berpotensi mencalonkan diri melawan Khofifah di Pilgub Jatim 2024, asalkan PKB atau PDIP tidak mengundangnya.

PKB punya Gus Halim Iskandar, Thoriqul Haq, dan Baddrut Tamam. Di PDIP ada Tri Rismaharini, Achmad Fauzi, dan Eri Cahyadi.

“Di luar afiliasi partai ada Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Namun, kendaraan partainya masih belum ditentukan,” imbuhnya.

Baihaki menjelaskan, lawan Khofifah di Pilgub Jatim 2024 masih belum pasti. Parpol saat ini fokus pada pemilu legislatif 2024 dan pemilu presiden 2024. Apalagi, kriteria pencalonan calon di Pilgub Jatim didasarkan pada hasil pemilu legislatif 2024 yang membutuhkan dukungan minimal 20 persen atau setara dengan 24 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim).

Syarat untuk mengusung calon minimal 20 persen, artinya membutuhkan 24 kursi di DPRD Jatim. Saat ini masih belum jelas partai mana yang bisa meraih jumlah kursi tersebut.

“Merujuk pada Pileg 2019, hanya PDIP dan PKB bisa saja mengusung calon secara mandiri. Namun pada pemilu legislatif 2024, saya perkirakan akan banyak kejutan, dan dominasi PDIP dan PKB bisa saja tertantang oleh partai lain,” ungkapnya.

Baihaki menyatakan, bagi partai yang ingin kadernya berpeluang menjadi Gubernur Jatim 2029, harus mengikuti Pilgub Jatim 2024. Kalaupun kalah di 2024, setidaknya punya cadangan elektabilitas di 2029. Baihaki menyoroti potensi yang ada pada kader PKB dan PDIP.

Namun partai-partai besar seperti PDIP dan PKB pasti akan mempertimbangkan dengan matang untuk mengusung calonnya di Pilgub 2024. Ini saatnya mengajukan calonnya sendiri.

Perhitungannya, jika calonnya kalah, setidaknya mereka punya cadangan elektabilitas terhadap seorang calon.

Siapa yang bisa dicalonkan kembali di Pilgub Jatim 2029, dimana Khofifah tidak bisa maju untuk periode ketiga, artinya tidak akan ada petahana yang dominan.

“Melihat arah politik saat ini, baik PKB maupun PDIP belum menyatakan secara terbuka apakah akan mencalonkan sendiri atau paling tidak mencap salah satu tokoh kedua partai tersebut. Kita hanya melihat aktivitas Achmad Fauzi dari PDIP yang mendapat perhatian di baliho dan di media,” tambahnya.

Terkait calon perseorangan, Baihaki menyebut potensi yang ada, namun ia menegaskan kekuatan mereka akan sulit bersaing dengan Khofifah.

“Jadi posisi Khofifah diuntungkan, sudah mendapat dukungan resmi dari empat partai, dan kemungkinan besar akan bertambah. Partai yang belum mengusung calon pasti akan berpikir dua kali untuk bersaing melawan Khofifah karena persaingan itu membutuhkan popularitas dari calonnya dan tentu saja, logistik memadai. Kalau salah satu dari itu tidak ada, maka sulit mengalahkan Khofifah sampai saat ini,” tutupnya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, terus terang membicarakan kriteria Cagub Jatim yang akan menjadi pilihan PKB. Menurutnya, sosok yang diusung harus memiliki ideologi NU.

Saat ini, PKB masih belum menentukan langkahnya dalam Pilgub Jatim. Partai tersebut masih dalam pertimbangan apakah akan

mengajukan calon sendiri atau bergabung dalam koalisi yang mendukung petahana, Khofifah Indar Parawansa.

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar telah mengisyaratkan bahwa ada perbedaan pandangan dengan Khofifah, baik dalam Pilgub maupun dalam dukungan pada Pilpres 2024.

Meskipun begitu, Muhaimin Iskandar mengakui bahwa pihaknya belum menentukan calon mana yang akan diusung. Saat ditanya mengenai hal ini, Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin Iskandar, hanya menjawab belum tahu.

“Belum tahu,” katanya.

Ketika ditanya apakah PKB akan berkoalisi dengan PDIP, Cak Imin tidak memberikan jawaban yang pasti. Ia menyatakan bahwa yang menjadi fokusnya adalah mengusung calon yang berideologi NU.

“Saya hanya ingin mengusung yang berideologi NU di Jatim,” katanya.

Meskipun PKB dan PDIP merupakan dua partai dengan elektabilitas dan jumlah kursi yang signifikan di Jawa Timur, keduanya masih merahasiakan siapa calon yang akan diusung. Sementara itu, partai lain seperti PAN, Gerindra, Demokrat, dan Golkar sudah memberikan rekomendasi kepada Khofifah untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Timur pada 2024.

Cak Imin sebelumnya telah mengakui perbedaan pandangan dengan Khofifah, terutama terkait dukungan pada Pilpres 2019. Perbedaan politik mereka juga terlihat pada Pil-

gub 2018, di mana PKB mendukung Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno, sementara Khofifah didukung oleh beberapa partai besar.

Cak Imin menegaskan bahwa perbedaan tersebut tidak akan berdampak negatif pada PKB. Menurutnya, PKB optimis dapat mempertahankan dukungan terbanyak di Jawa Timur, dan perbedaan pandangan merupakan hak demokrasi masing-masing individu.

Mengenai dukungan Khofifah pada pasangan Prabowo-Gibran, Cak Imin mengaku sudah mengetahui hal tersebut sejak lama.

“Kan kita sudah tahu, sudah lama. Kan sudah lama,” sambungnya.

Deretan partai politik yang telah menyatakan dukungan kepada Khofifah untuk kembali maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Timur adalah PAN, Gerindra, Demokrat dan Golkar.

PAN merupakan partai pertama yang merekomendasikan Khofifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur Jawa Timur 2024. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa rekomendasi tersebut hanya untuk calon gubernur, bukan calon wakil gubernur.

Emil Elistiano Dardak, kader PAN, dijadikan sebagai calon wakil gubernur pendamping Khofifah.

Partai Gerindra, yang diwakili oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Hashim Djojohadikusumo, memberikan rekomendasi kepada Khofifah untuk kembali maju di Pilgub Jawa Timur 2024. Hashim mengungkapkan bahwa Partai Demokrat akan mendukung dengan mengusung Emil Dardak sebagai calon wakil gubernur.

Partai Demokrat juga memberikan dukungan kepada Khofifah melalui Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Murti Yudhoyono (AHY). AHY menyerahkan surat rekomendasi secara langsung kepada Khofifah, menegaskan bahwa partai ini telah lama mengenal dan mendukungnya.

Partai Golkar memberikan dukungan langsung kepada Khofifah, yang diterima secara resmi dari Ketua Umum Airlangga Hartarto pada tanggal 23 Desember 2023.

• IRY



“Rasanya sulit mengingat sampai hari ini masih belum ada calon yang surveinya di atas 50 persen”

Muhammad Husni Thamrin



PILPRES 2024 TIDAK MUNGKIN SATU PUTARAN

Sebuah narasi yang muncul belakangan tersebar bahwa pemilihan presiden atau Pilpres 2024 hanya akan berlangsung dalam satu putaran saja. Target itu dianggap terlalu berlebihan dan malah membuat suasana demokrasi menjadi tidak sehat.

Melihat dari kekuatan para kandidat, sebetulnya mereka merata karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan serta punya cerukan sendiri. Bila secara jujur maka tidak ada yang mendominasi sehingga kemungkinan akan berlangsung dua putaran.

Pengamat politik dari FISIP Unsri Dr Ardiyan Saptawan menyebutkan Pilpres 2024 tak mungkin satu putaran karena tak sesuai dengan isi UUD 1945.

Menurutnya Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 menentukan tiga elemen penting yang harus dipenuhi jika hendak satu putaran saja, yaitu suara lebih dari 50 persen suara dalam pemilu, kemenangan tersebar minimal di 20 provinsi atau lebih dari setengah jumlah

provinsi, dan minimal dari 20 provinsi itu diperoleh 20 persen suara.

“Menurut saya pemilihan Presiden 2024 tidak mungkin berlangsung satu putaran,” kata Ardiyan Saptawan

Pilpres satu putaran saja bisa terjadi jika Pilpres bergulir hanya diikuti dua kontestan saja. Sedangkan Pilpres 2024 ini diikuti oleh tiga kontestan yakni para pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 telah mempunyai nomor urut.

Mereka pasangan Anies-Cak Imin nomor urut 01, Prabowo-Gibran nomor urut 02, dan Ganjar-Mahfud nomor urut 3. Dimana setiap Capres dan Cawapres ini didukung partai politik yang punya kekuatan mesin masing-masing. Sehingga kalau mau bermain jujur, tidak satupun pasangan calon yang mendominasi.

“Secara faktual ketiga paslon belum ada sampai mendekati 50 persen. Kalau dua paslon saja bisa kemungkinan terjadi satu putaran,” jelasnya.

Ragukan Hasil Survei

Ditelisiknya survei yang dilakukan itu pun masih tidak efektif apa lagi data yang aktual maksudnya data itu

b e -

nar-benar simpel dari seluruh suara rakyat Indonesia.

Bahkan hasilnya juga tidak efektif karena terang saja sudah jelas satu putaran harus mendapatkan suara 80 persen disebutkan namun hasil dari para paslon menunjukkan angka 40 persen saja tidak mampu melewati 50 persen.

“Survei itu tidak terbuka mereka yang melakukan survei juga menggunakan simple sedikit hanya orang-orang di perkotaan besar saja. Tidak bisa menjadi patokan survei secara nyata. Lagian juga hasil semua survei ketiga paslon tidak ada yang mencapainya angka 80 persen kalau ada baru bisa Pilpres nantinya hanya satu putaran,” paparnya.

Dia menyebutkan hasil debat Pilpres 2024 juga tidak menjadi penentuan kemenangan dari para paslon. Jadi jangan berpikir para partai pengusung bangga dengan hasil performa jagoannya.

Keberhasilan debat juga tidak terlalu berdampak untuk mendapatkan suara seluruh masyarakat di Indonesia saat pemilihan tanggal 14 Februari 2024 nanti. Sehingga bisa memenangkan salah satu paslon dan jumawa bisa mematok target satu putaran.

“Hasil debat juga tidak efektif karena tidak semua masyarakat di Indonesia melihat atau menonton. Saya yakin banyak daerah-daerah pedesaan yang luas di Indonesia mereka tidak memilih Internet televisi dan ada juga para santri dilarang memegang hape di tempat mereka sekolah. Jadi tidak semua orang menyaksikan debat artinya unggul di debat juga tidak menjamin dapatkan perhatian untuk suara nantinya,” ungkapnya.

Dia mencoba menerka apabila di tanggal 14 Februari 2024 ada kejutan dari rakyat Indonesia Pilpres bisa berlangsung satu putaran bisa saja terjadi. Tetapi sebenarnya dia tetap masih pesimis kejutan itu bisa terwujud.

Dia melihat ada peluang itu di pasangan paslon nomor urut 01 Anies-Cak Imin karena faktor religius di Indonesia mayoritas dihuni oleh rakyat beragama Islam.

Kondisi itu membuat paslon terkenal dengan politik identitas religius ini secara mengejutkan mendulang suara terbanyak. Karena apabila rakyat kaum religius melihat Anies Baswedan adalah kader HMI dan Cak Imin kader NU sedangkan dua paslon lainnya lebih kenal politik identitasnya ke arah nasionalis.

“Cak Imin anak dari pendiri NU dia dipilih warga NU dan Anies adalah santri NU.

Kemudian Mahfud MD paslon nomor urut 03 itu dia HMI, tetapi HMI ke Anies sebab dia kader HMI kental dengan islam modernnya.

Bisa saja terjadi gelombang kejut putar kedua ke paslon nomor 1, walaupun itu juga sulit karena banyak swing voter (suara mengambang) di Pilpres 2024 ini. Tetapi ada dampak

perpecahan di NU karena semua pejabat NU banyak ditarik Jokowi ke pemerintahan bisa jadi suaranya pecah juga sih,” pungkasnya.

Pengamat politik dan kebijakan publik Dr Muhammad Husni Thamrin juga sanksi kalau Pilpres 2024 bisa selesai hanya satu putaran saja. Menurutnya berpendapat sama dari survei tidak ada paslon mencapainya 50 persen cukup sulit untuk bisa berlangsung satu putaran saja.

“Rasanya sulit mengingat sampai hari ini masih belum ada calon yang surveinya di atas 50 persen. Swing voters termasuk undecided voters masih relatif banyak berkisar di angka 20 persen jika melihat rata-rata hasil survei dari beberapa lembaga,” jelas dia.

Dia menilai elektabilitas ketiga paslon kurang menonjol di mata rakyat Indonesia khususnya di area pelosok sehingga sulit untuk memenangkan survei jauh lebih tinggi dari ketiganya. Sebab, apabila tingginya elektabilitas dapat meningkatkan peluang kandidat atau partai dalam meraih suara mayoritas.

Selanjutnya faktor kedua penyebab terjadinya putaran kedua karena faktor elektoral dari masing-masing calon tidak ada yang sepenuhnya dominan. Pada dasarnya, keseimbangan antara elektabilitas dan aspek elektoral menjadi kunci sukses dalam dunia politik. Elektoral menekankan pada sistem, peraturan, dan mekanisme yang terlibat dalam pelaksanaan suatu pemilihan.

“Elektoral mencakup segala hal, mulai dari pemetaan wilayah pemilihan, penetapan calon, hingga penghitungan suara,” paparnya.

Dia kembali menilai ketiga paslon sulit untuk memenangkan suara rakyat Indonesia. Kendati paslon nomor urut 01 Anies Baswedan dan Cak Imin melakukan politik identitas religius tetap akan sulit memenangkan Pilpres 2024 dengan harapan bisa finishing di satu putaran.

“Ketiga paslon sama-sama sulit pada dasarnya calon memiliki potensial elektoral yang saling berimpit satu sama lain. Masih terlihat saling memperebutkan suara di Jawa sebab disana sebagai wilayah elektoral terbesar,” jelasnya.

Terakhir dia juga menyebutkan besarnya jumlah suara Gen Z tidak juga menjamin pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran menang satu putaran di Pilpres 2024. Terlebih lagi Gen Z sulit untuk dibujuk bukan hanya sekedar bermodalkan punya calon wakil presiden umur muda saja.

Tidak ada jaminan ada Gibran menang satu putaran! Suara gen Z sebenarnya lebih volatile ditambah potensi skeptisme. Sehingga usaha untuk memikat suara gen Z harus dilakukan secara serius dan dengan pilihan media dan content yang tepat juga.

“Kesamaan karakteristik sebagai anak muda saja tidak cukup untuk mengklaim representativeness Gen Z. Bagaimana keaktifan dan kerja keras untuk melibatkan gen Z (engagement) menjadi salah satu faktor yang lebih penting,” pungkasnya. ●RDR





“Namun faktanya masih banyak jalan protokol di Kota Palembang yang dipenuhi spanduk APK. Kita mempertanyakan dan meragukan kinerja Bawaslu dan Panwascam, kok dibiarkan ada pelanggaran di wilayah mereka”

Prasetya Sanjaya

ADA YANG MULAI TERJEBAK DI POLITIK PRAKTIS

Pelaksanaan pemilihan umum tidak lama lagi akan berlangsung. Para peserta Pemilu juga mulai saling berlomba untuk bersaing mendapatkan simpati rakyat agar bisa memilih mereka nantinya. Baik para calon legislatif maupun kader partai yang ingin memenangkan calon presidennya saling kejar-kejaran agar bisa unggul di tanggal 14 Februari nanti.

Persaingan ini juga terkadang menjebak para pelakunya untuk melakukan pelanggaran demi bisa memenangkan persaingan. Berdasarkan catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Sumatera Selatan, ada beberapa temuan yang mereka proses berkaitan netralitas serta keterlibatan orang-orangnya yang seharusnya tidak berhak untuk terjun di panggung politik.

Fenomena ketidaknetralan pejabat publik jelang Pemilu bukan menjadi hal baru dan rahasia di Indonesia. Masih banyak ditemukan pejabat, oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri. Bahkan sampai ke kepala desa hingga rukun tetangga (RT) yang tidak netral.

Seperti terjadi belum lama ini di Kabupaten Ogan Ilir. Diduga oknum kepala desa yaitu Kades Desa Beti, diduga ikut menghadiri dan menyaksikan acara kampanye pasangan calon (Paslon) nomor urut dua (2) yaitu Prabowo-Gibran di Kota Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Atas tindakannya ini, oknum Kades tersebut menjalani proses hukum atas laporan dari Bawaslu oleh Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Ahmad Naafi selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu Sumsel mengatakan, melihat bentuk pelanggaran pada perkara yang dilakukan Kades di Kabupaten Ogan Ilir (OI) masuk dalam bentuk dan sikap ketidaknetralan.

“Berdasarkan laporan saat ini Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir (OI) telah bekerja dan menyelesaikan proses laporan dengan meminta klarifikasi kepada pihak terkait khususnya terlapor yang merupakan seorang Kades serta memeriksa beberapa saksi. Bahkan atas perbuatan terlapor sendiri Bawaslu telah meminta keterangan saksi ahli pidana dan ahli bahasa untuk mengkaji dan melihat bentuk pelanggaran yang dilakukan oknum Kades tersebut,” terang Naafi.

Menurut Naafi berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian ber-

sama Gakkumdu I, kasus ini sendiri telah dilimpahkan ke penyidik Polres Ogan Ilir sehingga masih dalam proses penyidikan oleh Polres OI.

“Atas perbuatannya terlapor yang merupakan oknum Kades tersebut dikenakan dan dijerat Pasal 490 UU 7/2017 dengan ancaman hukuman selama satu tahun penjara dan denda hingga Rp 12 juta seperti uraiannya dan perkara ini masih dalam proses penyidikan Polres Ogan Ilir dan untuk tujuh hari hingga 14 hari kedepan terlapor menjalani pemeriksaan,” ungkapnya.

Sedangkan untuk sengketa Pemilu sendiri sampai saat ini belum ada yang bergilir sampai ke rana pidana, namun untuk laporan dari masyarakat ada yg diteruskan ke pidana seperti perkara oknum Kades di Kabupaten OI yang telah melakukan pelanggaran dengan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Untuk perkara yang bergulir sampai ranah pidana sendiri baru perkara oknum Kades di Kabupaten OI yang diduga tidak netral dan perkaranya masuk pada tahap penyidikan oleh Polres OI,” jelasnya.

Sedangkan untuk perkara yang terjadi menjelang pemilu 2024 tidak mereka pungkiri perkara-perkara tersebut ada, namun hanya sebatas pelanggaran administrasi, pidana dan etika serta pelanggaran hukum lainnya.

“Sedangkan untuk pelanggaran hukum lainnya perkaranya seperti berupa pelanggaran Alat Perkaranya (APK) yang menyalahi aturan Peraturan Daerah (Perda) serta perkara netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjadi di Kabupaten Ogan

Komering Ilir (OKI) yang telah diberikan sanksi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara,” ungkapnya.

Sedangkan untuk laporan Tim Pemenangan 02 yang melaporkan Bawaslu Kabupaten Lahat atas perkara pencopotan Alat Peraga Kampanye (APK) telah diterima Bawaslu Sumsel.

“Namun laporan tersebut berdasarkan kajian tim Bawaslu Sumsel, masih perlu perbaikan agar memenuhi syarat formil dan materil. Sedangkan pelapor dari tim pemenangan 02 tidak memperbaikinya hingga batas waktu yang ditentukan maka laporan tersebut tidak bisa diproses,” tuturnya.

Ragukan Kinerja Bawaslu

Di sisi lain meski sudah banyak yang telah dilakukan Bawaslu dalam menegakkan netralitas Pemilu 2024 namun kinerjanya masih diragukan bisa maksimal. Keraguan ini disampaikan Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BP2SS) yang menilai masih banyak pelanggaran diabaikan.

“Dalam satu bulan ini kami mencatat ada beberapa pelanggaran namun tidak ada tindakan yang nyata. Semua temuan-temuan sudah kami laporkan ke Bawaslu Palembang tapi

sampai sekarang tidak ada tindakan dengan alasan tak cukup bukti,”

ungkap Ketua BP2SS, Prasetya Sanjaya.

Dia memaparkan, salah satu pelanggaran yang terkesan diabaikan yakni adanya temuan seorang oknum Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Alang Alang Lebar Kota Palembang. Dimana yang bersangkutan masih tercatat sebagai kader Partai Hanura di PAC Hanura Alang Alang Lebar.

BP2SS telah melaporkan pelanggaran itu dengan menyertakan bukti berupa surat SK kepengurusan partai tahun 2022 disertai cap basah.

“Namun menurut Bawaslu Kota Palembang tidak terpenuhi dengan alasan nama oknum itu hanya sama dengan pengurus PAC namun orangnya beda. Padahal setelah kita telusuri ternyata sama. Ada dugaan kalau memang sudah ada permainan karena untuk menjadi PPK itu harus minimal lima tahun tidak di kepengurusan partai,” terang Prasetya.

Melihat kinerja Bawaslu Palembang ini, BP2SS akan melaporkannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar bisa ditindaklanjuti.

Mereka juga mengamati banyaknya spanduk-spanduk Caleg bertebaran di jalan protokol. Padahal berdasarkan aturan, jalan raya tidak boleh ada spanduk alat peraga kampanye (APK).

“Namun faktanya masih banyak jalan-jalan protokol di Kota Palembang yang dipenuhi spanduk APK. Kita mempertanyakan dan meragukan kinerja Bawaslu dan Panwascam, kok dibiarkan ada pelanggaran di wilayah mereka. Laporan ini juga kita sampaikan namun belum juga ada respon,” ujar Prasetya Sanjaya. ●RDR





MERASA PUAS, MERASA MENANG

Debat calon presiden dan wakil presiden menjadi salah satu poin penting dalam promosi dan mensosialisasikan calon yang diusung kader partai. Bagi kader di daerah performa jagoan mereka di kancah debat menjadi salah satu penyemangat untuk memenangkan Capres dan Cawapres yang didukung.

Pada debat Cawapres edisi keempat lalu, para kader partai mengaku merasa puas dengan performa jagoan mereka. Gimmick-gimmick politik yang dimainkan membuat suasana persaingan menjadi hangat. Suasana ini juga dirasakan kader di daerah.

Hal yang panas dari debat keempat Cawapres yakni muncul reaksi amarah publik kepada Cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka yang dinilai tidak beretika karena merespon lawan bicaranya Cawapres lainnya dengan gesture tubuhnya seperti mengejek.

Menanggapi hal itu, kader Partai Gerindra, Dany Desrandy Shariff menyebutkan apa yang dilakukan Gibran hanya gimmick semata bukan sengaja mengejek lawan bicaranya. Sehingga hal itu tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran etika.

Sejatinya debat untuk menunjukkan kualitas mental agar bisa melihat performa untuk menang debat atau unggul dalam sebuah kompetisi.

“Gimmick dalam proses perdebatan itu lumrah dilakukan. Kalau biasa saja malah terkesan jejak pendapat bukannya debat. InsyaAllah dia tidak seperti itu karena mewakili anak muda yang sopan. Bahkan Gibran itu lebih sopan daripada yang lainnya,” kata dia.

Dijelaskannya apa yang heboh dari reaksi gesture tubuh Gibran jangan disalah artikan semua publik Indonesia. Kendati banyak keluhan yang keluar di berbagai komentar tentang jalannya debat Cawapres yang dinilai semakin hot.

“Sebenarnya masalah etika saya rasa apa yang dilakukan Gibran banyak yang tidak tahu. Dia sudah menunjukkan sopan santun. Bahkan saat sebelum debat, dia mendatangi semua seniornya untuk membagikan donat,” ucapnya.

Menurutnya Dany, setiap manusia itu ada kelebihan dan kekurangan. Namun yang perlu diperhatikan itu bagaimana konsep dan gagasan yang ditawarkan kepada rakyat.

Sehingga dia berharap semua publik Indonesia tidak membesarkan masalah itu karena hanya gimmick dalam debat agar menjadi seru dan lebih menarik saja.

“Kalau mau bicara kekurangan kalau kita melihat Cak Imin dari rekaman jejak

digital sebenarnya sama saja. Kita ini pasti ada kekurangan kalau kita beberkan pastinya semua kandidat pernah melanggar secara etika semuanya sama saja. Kemudian masalah debat semalam tidak ada keputusan Gibran melanggar etika dari penyelenggara Pemilu,” tuturnya.

Dia juga menjelaskan sosok Prabowo Subianto dilihat saat debat terkesan meluap dan meledak emosional juga hanya sebagai wujud profil yang tegas.

Dany Desrandy juga tidak ingin masyarakat atau publik Indonesia salah melihat sosok calon pemimpin nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selama digelarnya debat Pilpres 2024.

“Pak Prabowo itu termasuk sudah lebih tenang dan terkontrol emosionalnya. Jadi kalau ada yang meluap dan meletup-letup itu biasa karena dia mantan militer jadi kalau ada yang emosional itu hanya sikap ketegasan yang terarah,” pungkasnya.

Kader Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Asrul Indrawan menyebutkan saat debat Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD merespon Gibran yang menyebutkan pertanyaan receh dan tidak mau menjawab hanya ungkapan spontan saja. Itu kemungkinan reaksi Mahfud MD merespon gaya bicaranya dalam sebuah debat.

“Mungkin penyampaian semua orang orang berbeda mungkin style Madura begitu, itu hanya gaya style saja. Saya yakin Pak Mahfud MD tidak seperti itu, dia hanya mengekspresikan diri saja. Alhamdulillah tidak terpancing emosi yang seperti yang terjadi di debat,” jelasnya.

Asrul Indrawan menilai di dalam panggung semua orang berbeda untuk mengekspresikan diri. Di juga menyebutkan Mahfud MD bahkan menganggap Gibran sebagai

anaknya sendiri. Berjalannya debat dia berharap jangan sampai memancing publik Indonesia salah menilai reaksi dan respon saat berlangsungnya debat.

“Pak Mahfud MD membicarakan agar bagaimana beretika dia orang yang santun itu ingin disampaikan sebenarnya. Untuk Bung Gibran sudah dianggapnya anaknya jadi dirasakan tidak pas melakukan itu. Intinya gagasan visi dan misi tetap di nomor satukan oleh Cawapres agar masyarakat bisa melihat poin penting di debat tersebut,” jelasnya.

Sementara kader PKB Momon Wahyudi menyebutkan semua yang dilakukan itu harus beretika telah disampaikan dengan lugas oleh Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Namun Gus Muhaimin bukan hanya menyinggung etika pribadi saat debat saja lebih kepada etika cara ilmu beretika. Dia menyebutkan sebenarnya rakyat Indonesia harus melihat debat tidak hanya intrik terjadi di dalamnya, namun banyak sekali pembelajaran yang didapat diam-bil oleh publik.

“Saat Gus Muhaimin menyinggung etika orang pasti berpikir menyinggung etika pribadi, tapi ketika beliau ngo-mong sebenarnya bukan menyinggung soal etika per-

sonal saja. Dia menyebut kita harus beretika levelnya itu tentang level kebijakan bernegara. Makanya kalau kita dengar semalam Gus Muhaimin menyampaikan etika bernegara bukan hanya bermaksud menyerang persoalan saja,” ucapnya.

Dia juga menyinggung soal reaksi Cawapres nomor urut 02 Gibran menyinggung soal Gus Muhaimin menjawab menggunakan catatan bagiannya data itu penting saat debat. Menurutnya catatan itu adalah semua data sangat penting disampaikan saat debat agar publik mendapatkan jawabannya autentik sesuai yang benar bukan opini saja belaka.

“Tapikan yang dibaca bukan catatan MK! Catatan itu penting terkadang seseorang untuk memutuskan sesuatu harus ada catatan khusus. Apa lagi Gus Muhaimin orang yang sangat berpengalaman saya terinspirasi beliau di usia muda menjadi wakil rakyat di DPR RI bahkan salah satu pencetus undang-undang desa adalah Gus Muhaimin. Saya rasa debat semalam Gus Muhaimin terlihat sangat santun dan jokenya juga joke politik,” tuturnya.

Secara keseluruhan Momon Wahyudi menyebutkan publik Indonesia menilai kenapa debat Cawapres berjalan seperti itu terkesan kandidat saling emosional satu sama lainnya. Namun sebenarnya itu hanya debat dengan beragam intrik guyonan politik dan joke-joke politik saja yang harus dipahami seluruh rakyat Indonesia.

“Ketika kita bicara debat, jam terbang berpengaruh! Kekurangan debat semalam sebenarnya ada hal yang baru. Nah yang dilakukan Gibran, hal baru yang kita lihat menggunakan gesture tubuh baru kita tahu ada yang seperti itu,” pungkasnya. ●RDR





“Sekarang siapa yang tidak menjalankan politik dinasti. Contohnya Surya Paloh beliau juga memunculkan sosok anaknya, Megawati ada Puan Maharani yang sekarang menjadi Ketua DPR RI, dan saya kira sah-sah saja”

Eddy Santana Putra

LEBIH KONDUSIF DARI LIMA TAHUN LALU

Ada perbedaan suasana politik yang cukup dirasakan masyarakat Indonesia dibandingkan dengan Pemilu 2019 lalu. Suasana terasa lebih kondusif dan masyarakat benar-benar merasakan hiruk pikuk pesta demokrasi tanpa harus saling menjatuhkan atau bahkan bermusuhan.

Beda pilihan boleh saja namun tidak sampai menimbulkan perpecahan seperti yang terjadi di lima tahun. Hal ini tentu membawa suasana positif bagi demokrasi Indonesia. Politik riang gembira memang betul-betul dirasakan.

“Hal ini terjadi karena di Pilpres ini kita punya tiga pilihan. Semuanya baik tapi ada pilihan yang paling baik. Jadi perbedaannya sangat jauh, terasa sekali suasana riang gembiranya. Tidak seperti Pemilu 2019 lalu, cuma dua diikuti dua kandidat dan masa kampanye cukup panjang sampai 6 bulan sehingga menimbulkan perpecahan di masyarakat,” ucap Eddy Santana Putra yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPR RI asal Sumatera Selatan.

Politisi senior dari Partai Gerindra ini mengungkapkan, tidak ada lagi istilah Cebong dan Kampret yang akhirnya malah menimbulkan perpecahan. Yang ada sekarang ini bersaing untuk menjadi yang terbaik.

Sebagai politisi dari Partai Gerindra, Eddy Santana Putra tentu mendukung Prabowo - Gibran untuk memimpin Indonesia selanjutnya menggantikan Joko Widodo.

Walikota Palembang periode 2003 - 2013 ini mengungkapkan, ada banyak hal yang membuat Prabowo - Gibran pantas memimpin Indonesia selanjutnya. Selain dapat melanjutkan proses pembangunan yang telah digagas Joko Widodo, estafet pembangunan dapat terus berjalan.

“Keputusan Prabowo memining Gibran adalah langkah yang tepat. Indonesia ke depan butuh pemimpin muda yang punya gagasan luas sekaligus estafet kepemimpinan. Gibran adalah sosok yang cerdas, kematangannya juga sangat baik karena dia adalah Walikota dan Indonesia ke depan butuh pemimpin muda,” ujar ESP yang saat ini bertugas di Komisi 5 yang membidangi infrastruktur.

Kemampuan Gibran salah satunya bisa dilihat pada debat Cawapres beberapa waktu lalu. Gaya anak muda yang ditampilkan Gibran bisa mewakili kaum

milenial dan Gen Z.

“Kalau bicara soal etika, yah tentu kita semua punya etika tinggal bagaimana menyikapinya. Gibran punya etika yang baik. Yang tidak punya etika misalnya dia punya hutang tapi tidak mau bayar malah balik menyalahkan orang mengutangnya. Nah itu baru tidak punya etika,” tegasnya.

Diakui Eddy, pasangan Prabowo - Gibran punya pengaruh elektabilitas yang besar bagi partai politik. Pengaruh Parpol pendukung cukup terdorong dengan hadirnya kedua sosok tersebut.

“Ada efek yang dapat mengangkat suara partai juga tentunya, dan itu terbukti dimana pasangan Prabowo-Gibran banyak diusung. Jadi saya yakin Partai Gerindra akan jadi pemenang pada Pemilu kali ini,” tegasnya.

Sosok Prabowo selama ini dikenal sangat mumpuni dan mau bekerjasama dengan siapapun serta memiliki pengikut yang militan. Sedangkan Gibran sosok anak muda yang sangat milenial, berprestasi, cerdas meskipun belum begitu berpengalaman seperti sosok ayahnya yaitu Joko Widodo.

“Artinya sosok Gibran matang dengan sendirinya, karena terus mendapatkan pembinaan dari tim nya, dari bapaknya, dan dari orang sekitarnya maupun dari diri sendiri,” terang nya.

IKN Wajib Dilanjutkan

Diakui ESP, awalnya dia sempat pesimis dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dianggapnya membuang anggaran. Butuh banyak biaya memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara.

Namun setelah melihat langsung, mengetahui konsep yang ditawarkan sikap pesimis itu mulai hilang. Bahkan ESP mendukung pembangunan IKN karena konsep pembangunan masa depan Indonesia memang seharusnya ada ibu kota baru

tersebut.

“Artinya mau atau mau, suka atau tidak suka, IKN tetap harus dilanjutkan karena ada undang-undang yang mengaturnya. Kalau kita konsep pembangunan yang ada IKN saya yakin pasti kita akan setuju karena dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dengan menerapkan konsep hijau,” ujar ESP.

Terkait besarnya biaya pembangunan untuk IKN ini yang mencapai sekitar Rp 1700 triliun, ESP menilai hal itu wajar karena dampak positifnya

juga akan besar. Hal ini bisa dilihat saat pemerintah mengeluarkan anggaran Rp 700 triliun untuk mengatasi Covid 19 namun yang dirasakan juga besar. Indonesia berhasil lepas dari bencana Covid 19.

“Ketika saya melihat ada pembangunan berkonsep Green City, pengendalian banjir, pembangunan jalan-jalan, serta menerapkan kendaraan ramah lingkungan dengan menggunakan mobil listrik. Jadi mengapa negara harus takut kan untuk kemajuan bangsa ini sendiri,” ungkapnya.

Politik Dinasti Tidak Masalah

Masuknya Gibran ke dalam lingkaran politik hingga akhirnya menjadi Cawapres tentu tidak lepas dari privilege orangtuanya, Joko Widodo. Hal itu menunjukkan kalau Jokowi menjalankan dinasti politik.

Jokowi memang tidak menjalankan kekuasaannya hingga tiga periode karena memang dilarang namun dia tetap kembali berkuasa melalui tangan anaknya, Gibran Rakabuming Raka.

“Menurut saya itu manusiawi. Sekarang siapa yang tidak menjalankan politik dinasti. Contohnya Surya Paloh beliau juga memunculkan sosok anaknya, Megawati ada Puan Maharani yang sekarang menjadi Ketua DPR RI, dan saya kira sah-sah saja. Kita lihat pemimpin luar negeri, di India ada klan Gandhi. Di Amerika ada klan Kennedy dan klan Bush,” ujarnya.

Bahkan ESP mengaku menyesal karena tidak mengajak anaknya sejak dulu ikut kegiatan politik tapi baru sekarang. Sekarang Jokowi telah memetik hasilnya.

“Makanya saya yakin Prabowo - Gibran akan membawa Indonesia lebih lagi karena nanti akan didampingi Bapak Bangsa yakni Jokowi. Kalau pemimpin bangsa dan bapak bangsa bergabung tambah hebat Indonesia nanti,” jelasnya.

Untuk itu Eddy Santana Putra yang di Pemilu 2024 ini kembali mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI dari Dapil 1 Sumsel merasa yakin kalau Prabowo - Gibran akan menang satu putaran.

Keyakinan mereka bukan hanya dari hasil survei saja namun dari antusias masyarakat terhadap pasangan Prabowo - Gibran cukup besar sekali terutama dari kaum milenial atau anak muda.

“Kalau menang satu putaran kan bisa menghemat anggaran sehingga dananya bisa dimanfaatkan untuk yang lain nanti,” ucap ESP.

●RDR



“Peserta pemilu harus menggunakan cara-cara yang meyakinkan. Membutuhkan kedewasaan supaya semuanya dilakukan dalam cara-cara yang patut dan penuh kedamaian”

Lolly Suhenty



CEGAH POLITIK UANG AWASI RAPAT UMUM

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan seluruh jajaran akan mengawasi tahapan rapat umum yang akan dimulai pada 21 Januari sampai 10 Februari 2024. Mulai dari Pengawas Kelurahan Desa (PKD), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), hingga jajaran staf Bawaslu akan turun gunung.

“**P**engawasan dilakukan di dalam dan luar area rapat umum. Misalnya di luar arena untuk mengawasi terjadinya pembagian politik uang,” kata Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dalam kegiatan Deklarasi Pemilu Damai di Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024.

Bagja menuturkan, dalam melaksanakan tugas, seluruh jajaran Bawaslu wajib memakai tanda pengenal atau atribut. Tujuannya supaya mudah dikenali oleh penyelenggara, peserta pemilu dan masyarakat.

“Jadi tidak boleh ada pengawas yang tidak memakai tanda pengenal. Supaya keberadaan Bawaslu bisa terlihat. Sehingga masyarakat mengetahui kerja-kerja Bawaslu,” tuturnya.

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, menuturkan, tahapan kampanye tidak lama lagi akan berakhir. Peserta pemilu harus bisa memanfaatkan momentum ini dengan melakukan sosialisasi kepada pemilih. Karena pemilih berhak mendapatkan informasi atau visi misi yang diusung oleh kontestan pemilihan.

“Peserta pemilu harus menggunakan cara-cara yang meyakinkan. Membutuhkan kedewasaan supaya semuanya dilakukan dalam cara-cara yang patut dan penuh kedamaian,” ungkapnya.

APK Bermasalah

Rahmat Bagja juga mengimbau seluruh peserta Pemilu dan Pilpres 2024 untuk meninjau kembali pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang dinilai bermasalah. Hal ini supaya apk yang terpasang tidak membahayakan masyarakat sekitar.

“APK yang membahayakan, kami mengimbau kepada peserta pemilu untuk mereview kembali terhadap pemasangan APK, jika kemudian mengakibatkan kecelakaan atau lain-lain, maka hal itu yang wajib kita hindari,” seru Bagja.

Untuk mengatasi APK bermasalah, Bagja telah memerintahkan jajaran pen-

gawas pemilu untuk melakukan penertiban APK yang bermasalah. Dia menjelaskan APK bermasalah itu yang dipasang di tempat yang dilarang sesuai PKPU 15/2023. Lalu APK yang membahayakan dapat dipastikan itu sangat bermasalah.

“Kami (Bawaslu) perintahkan ke jajaran untuk berkoordinasi dengan peserta pemilu dalam penertiban APK. Kami harap sekarang tidak ada APK yang jatuh mungkin karena angin dan yang lain, bisa dipasang dengan baik dan bisa dipasang dengan sesuai aturan,” papar alumnus Utrecht University itu.

Bagja juga berharap peserta Pemilu dan Pilpres 2024 dapat mengerti bagaimana pemasangan APK yang baik dan benar sesuai aturan di tempat-tempat umum. Selain itu, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat memberikan akses seluas-luasnya kepada pengawas pemilu sesuai dengan aturan berlaku.

“Kami minta seluruh pengawas untuk mengingatkan pemda dalam melakukan penertiban. Bawaslu tidak bisa sendiri. Oleh sebab itu, Pemda harus ikut menegakkan hukum sesuai PKPU 15/2023 dalam penertiban APK. Kalau pembersihan APK nanti pada 11 Februari 2024,” papar Bagja.

Kampanye Berintegritas

Bawaslu, Koalisi Masyarakat Sipil, Peserta Pemilu dan Pilpres mendeklarasikan komitmen bersama kampanye pemilu berintegritas di media sosial Pemilu 2024. Kampanye di media elektronik serta digital dimulai bersamaan dengan kampanye rapat umum yang resmi dimulai hari ini 21 Januari hingga 10 Februari 2024.

Rahmat Bagja mengatakan deklarasi ini merupakan langkah penting dalam melaksanakan kampanye di media sosial yang bersih dari politisasi SARA, disinformasi, dan kampanye hitam.

“Hal ini merupakan tanda baik dan awal baik dalam melaksanakan metode rapat

umum terbuka dan kampanye di media elektronik,” kata dia dalam Kegiatan Deklarasi Pemilu Damai di Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024.

Bagja menyatakan sekarang peserta Pemilu dan Pilpres sudah boleh mengajak di media elektronik dan digital, bukan hanya sosialisasi. Dia meminta kepada jajaran pengawas pemilu agar dapat menjaga semua proses yang ada dalam rapat umum dan di media elektronik serta digital.

“Jadi sudah boleh mengajak mencoba, menawarkan visi misi, citra diri, boleh dilakukan bapak ibu peserta pemilu,” ujar Bagja.

Ketua Presidium Koalisi 12 Masyarakat Sipil, Wijayanto, mengatakan, ruang publik yang sehat harusnya berisi informasi yang benar seperti oksigen untuk demokrasi. Sebaliknya, ruang publik yang sarat kebohongan dan disinformasi adalah gas beracun dan mengancam demokrasi. Hal ini karena dalam satu

negara demokrasi, kedaulatan tertinggi berada di tangan warga negara, yang diandaikan mampu mengambil pilihan politik yang rasional untuk dirinya sendiri.

“Dasar dari pengambilan keputusan adalah informasi yang diperoleh dari ruang publik yang sumber utamanya medsos. Dengan demikian, jika medsos kita sarat dengan ujaran kebencian dan disinformasi, maka yang lahir adalah pilihan politik yang keliru, tak hanya itu bisa saja melahirkan perpecahan politik dan pertikaian bangsa. Maka kita perlu memastikan ruang publik kita terbebas dari disinformasi dan ujaran kebencian di medsos,” papar dia.

Selain melakukan deklarasi, Bawaslu, Koalisi Damai Masyarakat Sipil, partai politik peserta pemilu, dan peserta pilpres melakukan penandatanganan komitmen damai kampanye pemilu berintegritas. Deklarasi turut disaksikan oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tinggi Agama Konghucu, Parisada Hindu Dharma Indonesia, awak media serta pengawas pemilu dari seluruh daerah yang hadir di tempat acara.

Ada empat poin utama dalam deklarasi tersebut, yakni komitmen bersama melawan disinformasi, komitmen bersama melawan diskriminasi identitas dan ujaran kebencian serta atas perlindungan anak, komitmen bersama atas transparansi iklan politik, dan komitmen bersama untuk transparansi informasi. •RDO





“Kondisi saat ini bahkan meningkatkan potensi gesekan antar-pendukung. Lokasi kampanye dekat ditambah peserta kampanyenya yang berasal dari berbagai daerah. Makin tinggi potensi gesekannya”

Kaka Suminta

INFO
KPU

Minggu IV • Januari 2024

23

ZONASI KAMPANYE BELUM EFEKTIF POTENSI GESEKAN RAWAN TERJADI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menegur pasangan calon presiden dan wakil presiden yang melakukan kampanye rapat umum atau kampanye terbuka di luar jadwal zonasi. Kampanye rapat umum Pemilu 2024 berlangsung selama 21 hari, mulai 21 Januari sampai 10 Februari.

“Nanti dapat teguran, ya, kalau seandainya betul bahwa kampanye di luar jadwal dan kampanye yang ditentukan. Ini kan tidak sekadar zonasi, tetapi juga ada jadwalnya,” kata Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, Senin, 22 Januari 2024.

Hasyim mengatakan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi setiap zona kampanye terbuka. Berdasarkan hasil rapat antara KPU dengan perwakilan partai dan tim sukses pasangan calon peserta Pilpres 2024, telah disepakati agar pasangan calon presiden dan wakil presiden menaati jadwal zonasi kampanye terbuka.

Menurut dia, untuk memudahkan pengaturan kampanye dibutuhkan pengelompokan zonasi agar partai politik koalisi pendukung pasangan calon dapat berkampanye di zona yang sama. Demikian juga bagi partai politik, yang tidak menjadi bagian dari gabungan partai politik pendukung pasangan calon bersangkutan, telah ditentukan dengan zonasi tersendiri.

KPU pun telah menetapkan tiga zona untuk kampanye akbar Pemilu 2024, yakni Zona A, Zona B, dan Zona C. “Berdasarkan kesepakatan itulah yang kemudian dibuat keputusan KPU tentang jadwal dan juga zona kampanye yang menggunakan metode rapat umum. Pada prinsipnya begitu,” ujar Hasyim.

Meski demikian, KPU memberikan keleluasaan kepada tim sukses pasangan calon pada H-3 atau tiga hari sebelum pelaksanaan kampanye terbuka berakhir untuk berkampanye di seluruh wilayah Indonesia tanpa menggunakan ketentuan zonasi.

Hasyim menegaskan, zonasi dan waktu kampanye yang telah ditetapkan berfungsi untuk menjaga dinamika politik sehingga menghindari konflik antar pendukung yang rawan terjadi.

Dia juga meminta setiap timses paslon dan partai politik untuk memperjelas nama setiap acara yang dibuat. Menurutnya, tidak boleh menyamakan antara pertemuan terbatas dengan kampanye rapat terbuka.

“Jadi kalau kampanye dengan metode

rapat umum itu tanpa undangan spesifik, siapapun boleh hadir. Namun demikian, kalau yang kampanye dengan metode pertemuan terbatas, itu kan ada batas jumlah orang yang ikut, tetapi juga orang yang hadir itu adalah orang-orang tertentu yang diundang,” kata Hasyim.

Hasyim menyampaikan bahwa kampanye rapat terbuka diperkenankan untuk menghadirkan orang-orang tanpa undangan. Sedangkan pertemuan terbatas dilakukan dengan sedikit orang dan sifatnya undangan.

“Kalau sifatnya undangan terbuka tidak spesifik nama-nama orang yang diundang, itu masuk kategori rapat umum. Tapi kalau yang diundang itu spesifik atau nama-nama yang diundang termasuk parpol, itu disebut pertemuan terbatas,” kata Hasyim.

Selain KPU, Hasyim juga menyebut Bawaslu siap melakukan pengawasan terhadap kampanye terbuka. “Nanti ada KPU dan Bawaslu [yang mengawasi],” ujarnya.

Meski demikian, KPU memberikan keleluasaan kepada tim sukses pasangan calon pada H-3 atau tiga hari sebelum pelaksanaan kampanye terbuka berakhir untuk berkampanye di seluruh wilayah Indonesia tanpa menggunakan ketentuan zonasi.

Zonasi Belum Efektif

Pengaturan zonasi untuk kampanye terbuka atau rapat umum bagi peserta pemilu dinilai belum efektif. Hingga hari ketiga masa kam-

panye terbuka, Selasa, 23 Januari 2024, masih ada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden hingga calon legislatif yang menggelar rapat umum tidak sesuai zona. Kondisi itu dikhawatirkan mengakibatkan meningkatnya potensi gesekan antar-pendukung kandidat yang berbeda.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu, Kaka Suminta, mengatakan, zonasi kampanye terbuka yang ditetapkan KPU tidak efektif. Masih ditemukan peserta Pemilu 2024, baik calon presiden dan wakil presiden maupun calon anggota legislatif, dari kelompok politik berbeda yang menggelar kampanye di wilayah yang sama.

“Tidak efektif. Kondisi saat ini bahkan meningkatkan potensi gesekan antar-pendukung. Lokasi kampanye dekat ditambah peserta kampanyenya yang berasal dari berbagai daerah. Makin tinggi potensi gesekannya,” ujarnya.

Menurutnya, lokasi kampanye yang berdekatan, misalnya dalam satu provinsi, pada dasarnya masih bisa ditoleransi apabila pendukun mereka berasal dari daerah sekitarnya. Namun, fakta lapangan menunjukkan kampanye diikuti masyarakat dari daerah

yang beragam. Mereka kadang diangkut dengan bus atau membawa kendaraan sendiri, melewati zona kampanye kandidat lainnya.

Potensi gesekan, lanjut Kaka, muncul saat kampanye usai dan pendukung secara masif pulang ke daerah asal. Titik pertemuan antar-pendukung rentan terjadi bentrokan. Ia mencontohkan kegiatan kampanye di Boyolali, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

“KPU dan Bawaslu seharusnya membangun hubungan baik. Komunikasi pengurus tingkat pusat dan daerah juga harus dilakukan,” ucapnya.

Komunikasi antar-penyelenggara pemilu berbagai tingkatan, kata Kaka, cenderung tidak baik. Selain zona kampanye capres dan cawapres yang berimpitan, kegiatan caleg baik tingkat DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang semakin menambah kompleks persoalan.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Ihsan Maulana, menambahkan, PKPU 15/2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum tidak mengatur secara jelas soal sanksi kampanye akbar atau rapat umum yang tidak sesuai dengan zonasi.

Namun, dalam tahapan kampanye terbuka itu, ada proses perizinan yang harus dilalui. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dapat melarang atau tidak memberikan izin kampanye jika tidak sesuai dengan zonasi yang ada.

“Karena sudah diatur zonasi dan jadwal kampanye, seharusnya kampanye masing-masing pasangan calon tidak tumpang tindih. Ini butuh komitmen dari peserta pemilu dan antisipasi dari penyelenggara pemilu,” tuturnya.

Ihsan menambahkan, dalam waktu kampanye yang terbatas, tumpang tindih kampanye di zonasi yang sama dipicu oleh skala prioritas tim kampanye. Tiap-tiap tim kampanye tentu mempertimbangkan ceruk pemilih potensial. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu harus memastikan mereka benar-benar kampanye sesuai dengan zonasi. ●RDO



"Saya tidak perlu mengomentari hasil survei tersebut, kenapa? Karena 17 pengamat ekonomi tersebut tidak bisa merefleksikan keseluruhan pengamat ekonomi dan analisis pasar lainnya"

Heru Dewanto



ANIES UNGGULAN EKONOM

Anies Baswedan menjadi calon presiden paling unggul yang dipilih ekonom dan analis senior berdasarkan survei yang dilakukan baru-baru ini oleh Bloomberg.

Dalam survei yang dilakukan terhadap 17 ekonom dan analis senior itu, capres nomor urut 01 itu mendapat nilai tinggi dan dianggap paling tepat memimpin Indonesia. Nilai yang didapat Anies adalah 33 dari 17 ekonom dan analis senior itu.

Sementara, Prabowo Subianto sebagai capres nomor urut 02 ada di posisi kedua dengan nilai 29. Terakhir, capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo di posisi ketiga dengan nilai 28.

Selain mengunggulkan Anies, hasil survei itu juga memprediksi perekonomian Indonesia. Mereka menilai ekonomi akan maju cepat lebih dari 5 persen.

Bukan hanya itu, survei yang dilakukan Bloomberg ini juga menyoroti pemilihan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo maju sebagai cawapres nomor urut 02. Pemilihan Gibran ini memicu tuduhan membangun dinasti politik ala Jokowi.

"Keduanya (Prabowo dan Gibran) berjanji untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan Jokowi, termasuk hilirisasi mineral dan pembangunan ibu kota baru senilai USD34 miliar," tulis Bloomberg, Jumat, 19 Januari 2024.

Bahkan dalam survei itu, 10 dari 17 ekonom dan analis senior menyebut dinasti yang dibangun di bawah Jokowi bukan pertanda baik bagi pasar dan perekonomian. Survei ini juga mengungkap sejumlah temuan lain.

Pertama, pertambangan dan logam dinilai sebagai sektor yang menarik bagi investor. Keduanya bisa menjadi fokus selama tahun pemilu, diikuti oleh infrastruktur dan energi terbarukan.

Kedua, para analis mengatakan bahwa kebijakan hilirisasi Indonesia harus dilanjutkan oleh penerus Jokowi, diikuti oleh reformasi infrastruktur dan transisi energi hijau.

Ketiga, sebagian besar responden menyebut ketergantungan yang besar pada batu bara adalah salah satu kebijakan yang seharusnya tidak dilanjutkan.

Menanggapi survei Bloomberg itu, Anies Baswedan mengaku semakin yakin dengan gagasan perubahan yang diusungnya dalam kontestasi Pilpres 2024.

"Kami bersyukur atas kepercayaan para ekonom yang memberikan penilaian itu dan ini adalah sebuah institusi yang amat berhati-hati di dalam menyampaikan hasil hasil assessment. Bagi kami itu adalah sebuah kehormatan dan membuat kami makin yakin dengan platform yang

kami bawa, platform dan gagasan perubahan," ujar Anies di Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat, 19 Januari 2024.

Gagasan tersebut, menurut Anies, antara lain mengenai rencana untuk menjaga perekonomian agar tetap tumbuh dengan menyerap tenaga kerja lebih banyak, meratakan pertumbuhan bukan hanya di beberapa lokasi di Jawa tapi di seluruh Indonesia dan berkelanjutan.

"Jadi gagasan yang kami bawa tentang pertumbuhan itu melihat apa yang disimpulkan oleh para ekonom itu," kata Anies.

Anies mengaku bersyukur para ekonom memiliki kepercayaan diri atas apa yang pihaknya rencanakan untuk Indonesia ke depannya. "Itu yang membuat kami juga makin yakin untuk meyakinkan seluruh masyarakat bahwa gagasan yang kami bawa insya Allah bisa dilaksanakan dan membawa perubahan dan perbaikan Indonesia," ucapnya.

Lebih lanjut, Anies menekankan bakal mendorong industrialisasi padat karya untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Industri yang didorong adalah industri padat karya. Selama ini kami melihat banyak investasi, namun bersifat banyak modal. Sehingga pertumbuhan ekonomi memang tinggi, tapi penyerapan tenaga kerja rendah," tutur Anies.

Anies menyebutkan, wilayah Batam khususnya, membutuhkan dorongan investasi yang berorientasi kepada pembukaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak.

Pihaknya juga berjanji bakal mengubah tata niaga pangan agar tercapai harga yang

bisa dijangkau semua warga. "Dengan begitu harga pangan lebih terjangkau semua lapisan masyarakat," ujar Anies.

Anies menambahkan, tantangan utama di hampir semua kota adalah penyediaan transportasi umum yang memadai. Dengan adanya transportasi umum yang dapat diandalkan, maka akan membuat kegiatan rutin masyarakat bisa menggunakan kendaraan umum.

"Dengan begitu mengurangi kemacetan dan mengurangi beban ekonomi transportasi di tingkat keluarga," ujar mantan gubernur DKI Jakarta ini.

Dosen senior dan peneliti senior di Pusat Penelitian Indo-Pasifik Universitas Murdoch, Ian Wilson, menilai, tidak ada jaminan kebijakan Jokowi akan berlanjut di bawah kepresidenan Prabowo. Wilson sendiri tidak ikut serta dalam survei ini.

"Begitu Jokowi tidak menjabat lagi, pengaruh politiknya akan berkurang secara signifikan. Dia tidak memiliki sumber daya

keuangan yang signifikan untuk memberikan pengaruh, atau kendaraan politik yang kuat," kata Wilson.

Di sisi lain, kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengaku tak percaya dengan hasil survei Bloomberg terhadap belasan ekonom yang menunjukkan bahwa Anies Baswedan mendapatkan poin tertinggi dibandingkan dua pesaingnya.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menilai, Ganjar sendiri sudah terbukti menjadi gubernur dua periode dan memiliki rekam jejak yang bagus ketika memimpin Jawa Tengah.

"Jadi, kalau misalnya ada survei yang mengatakan bahwa Ganjar mendapatkan angka 28, saya sih tidak meyakini itu mencerminkan keadaan sebenarnya. Jadi buat saya sih jawabannya prestasinya Ganjar di Jawa Tengah itu sudah point of self," kata Todung.

Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar-Mahfud, Heru Dewanto, menilai survei Bloomberg tak bisa mencerminkan realita sesungguhnya soal persepsi terhadap capres-capres. Apalagi menurut TPN, survei tersebut hanya meminta jajak pendapat dari 17 orang ekonom maupun analis market.

"Saya tidak perlu mengomentari hasil survei tersebut, kenapa? Karena 17 pengamat ekonomi tersebut tidak bisa merefleksikan keseluruhan pengamat ekonomi dan analisis pasar lainnya," kata Heru.

Namun, pihaknya tetap mengapresiasi para ekonom sudah mau disurvei terkait sudut pandang dan preferensi mereka di Pemilu 2024. Heru mengatakan, pihaknya selalu melakukan evaluasi terhadap berbagai hasil survei yang ada.

"Kami selalu terbuka atas kritik maupun masukan karena dengan semua kritik dan juga masukan kita bisa lebih memperbaiki visi dan misi ekonomi kami," terangnya.

•RDO

